

**HASIL PENELITIAN**

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR 9 TAHUN  
DI KOTA MAKASSAR  
(KARAKTERISTIK KEPULAUAN DAN DARATAN UTAMA  
KECAMATAN UJUNG TANAH)**

**HASRIWATI SYARIF  
P0203206501**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2008**

**HASIL PENELITIAN**

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR 9 TAHUN  
DI MAKASSAR  
(KARAKTERISTIK KEPULAUAN DAN DARATAN UTAMA  
KECAMATAN UJUNG TANAH)**

**HASRIWATI SYARIF  
P0203206501**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2008**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Efektivitas Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun di Kota  
Makassar (Karakteristik Kepulauan dan Daratan  
Utama Kecamatan Ujung Tanah).  
Nama : Hasriwati Syarif  
Nomor Pokok : P0203206501  
Program Studi : Perencanaan dan Pengembangan Wilayah

Menyetujui,  
Komisi Penasehat

Ketua

Anggota

Dr. Ir. Ria Wikantari, M.Arch

Dr. Ir. Huzairin Zubair, M.Sc

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

Dr. Ir. Roland A. Barkey, DEA

## DAFTAR ISI

PRAKATA	iv
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Kebijakan Publik	Ke 12
B. Efektivitas	Efe 16
C. Kemampuan SDM	Ke 19
D. Anggaran	An 27
E. Peran Serta Masyarakat	Per 32
F. Penelitian Terdahulu	Pe 40

	G.	angka Pemikiran	Ker 40
	H.	otesis	Hip 43
BAB III.		METODE PENELITIAN	45
	A.	is penelitian	Jen 45
	B.	asi dan Waktu Penelitian	Lok 45
	C.	pulasi dan Sampel	Po 45
	D.	label Penelitian	Var 47
	E.	is dan Sumber Data	Jen 47
	F.	Teknik Pengumpulan Data	47
	G.	Teknik Analisis Data	48
	H.	Definisi Operasional	50
BAB IV.		HASIL DAN PEMBAHASAN	55
	A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	55
	B.	Deskripsi Umum Responden	59
	C.	Deskripsi Variabel Penelitian	62
	D.	Pengaruh Kemampuan SDM Aparat, Anggaran, dan Peran Serta Masyarakat terhadap Efektivitas Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun	73
	E.	Pembahasan Hasil Penelitian	78
BAB V.		PENUTUP	94
	A.	Kesimpulan	94

B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	100

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam Undang-Undang Pendidikan Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 disebutkan, bahwa Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Tantangan yang makin besar di masa akan datang hanya dapat diatasi dengan terus menerus membangun sistem pendidikan dan kebudayaan nasional secara berkelanjutan. Karena itu, sistem Pendidikan Nasional dan Kebudayaan harus terus dibina dan dikembangkan, sehingga mampu meningkatkan keunggulan bangsa di tengah-tengah persaingan yang terus bertambah ketat.

Sebagaimana dinyatakan di dalam GBHN 2004/2009 bahwa di bidang pendidikan masalah yang dihadapi adalah berlangsungnya pendidikan yang kurang bermakna bagi pengembangan pribadi dan watak peserta didik, yang berakibat hilangnya kepribadian dan kesadaran akan makna hakiki kehidupan. Untuk itulah perlu dilakukan langkah-langkah sebagaimana berikut ini: 1) Mengupayakan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan

yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti, 2) Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan, 3) Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional, 4) Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai, 5) Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen, 6) Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, 7) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu, dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh



komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan perlindungan sesuai dengan potensinya.

Prioritas pembangunan pendidikan nasional adalah : Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Peningkatan mutu setiap jenis dan jenjang pendidikan, Peningkatan pendidikan dalam rangka penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta Peningkatan relevansi pendidikan. Relevansi pendidikan ini sejak 1993 dikenal dengan kebijakan keterkaitan dan kesepakatan atau "*Link and Match*". Sepuluh tahun setelah dicanangkan wajib belajar enam tahun di SD/ MI dan yang setara pada Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 1994 Presiden Soeharto mencanangkan Gerakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (6 tahun di SD/ MI dan yang setara, 3 tahun di SLTP/ MTs dan yang setara). Pelaksanaan Gerakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun tersebut dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1992.

Mengingat anggaran yang tersedia maka penuntasan wajib belajar sembilan tahun direncanakan dalam Repelita atau 15 tahun. Program penuntasan wajib belajar dasar sembilan tahun bukanlah semata-mata menyangkut penyediaan kesempatan belajar (pemerataan pendidikan), melainkan juga menyangkut peningkatan mutu lulusan dan relevansi produk SDMnya dengan pembangunan. Perluasan dan pemerataan kesempatan belajar/pendidikan di satu sisi dan perbaikan mutu serta relevansinya dengan pembangunan di sisi lain, bukanlah merupakan dua hal yang bersifat alternatif. Karena Globalisasi yang ada didepan mata serta persaingan yang

akan datang memperluas dan meratakan kesempatan memperoleh pendidikan, memperbaiki mutu dan relevansi pendidikan. Keduanya harus dilaksanakan secara bersama-sama. Hal inilah yang merupakan tantangan utama seluruh jajaran Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen lainnya serta masyarakat dan orang tua dalam rangka untuk meningkatkan kinerja, sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan maupun pelayanan.

Pentingnya kualitas manusia Indonesia ini telah diakui misalnya dalam GBHN 1993 yang secara tegas dan jelas menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia (*human resources development*) (Anonymous, 1993). Bahkan sejak awal 1970-an pendidikan sudah menjadi prioritas pemerintah. Pada tahun 1973 berdasarkan Inpres Nomor 10 Pemerintah secara terencana meningkatkan pembangunan sarana pendidikan dasar. Tahun 1983 dimulai program wajib belajar untuk usia 7-12 tahun secara nasional atau yang dikenal dengan istilah wajib belajar 6 tahun. Sukses yang dicapai dengan program wajib belajar 6 tahun ini memotivasi pemerintah untuk meningkatkan program wajib belajar menjadi 9 tahun.

Program wajib belajar 9 tahun didasari konsep "pendidikan dasar untuk semua" (*universal basic education*), yang pada hakekatnya berarti penyediaan akses yang sama untuk semua anak. Tujuan yang ingin dicapai dengan program ini adalah merangsang aspirasi pendidikan orang tua dan anak, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan produktifitas kerja penduduk secara nasional. Program wajib belajar 9 tahun ini memiliki empat ciri utama: *Pertama*, tidak dilakukan melalui paksaan tetapi himbauan,

*Kedua* tidak memiliki sanksi hukum tetapi menekankan tanggung jawab moral dari orang tua untuk menyekolahkan anaknya, *Ketiga* tidak memiliki undang-undang khusus dalam implementasi program, *Keempat* keberhasilan dan kegagalan program diukur dari peningkatan partisipasi bersekolah anak usia 7-14 tahun (Depdiknas, 2002).

Setidak-tidaknya ada lima alasan bagi pemerintah untuk memulai program wajib belajar 9 tahun: 1) Lebih dari 80 persen angkatan kerja hanya berpendidikan Sekolah Dasar (SD) atau kurang, atau SMP tidak tamat; 2) Program wajib belajar 9 tahun akan meningkatkan kualitas SDM dan dapat memberi nilai-tambah pada pertumbuhan ekonomi; 3) Semakin tinggi pendidikan akan semakin besar partisipasi dan kontribusinya di sektor-sektor yang produktif; 4) Dengan peningkatan program wajib belajar dari 6 tahun ke 9 tahun, akan meningkatkan kematangan dan ketrampilan siswa; 5) Peningkatan wajib belajar menjadi 9 tahun akan meningkatkan umur kerja minimum dari 10 ke 15 tahun (Depdiknas, 2002).

Pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun selama empat tahun pertama sejak dicanangkan sebenarnya telah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Jumlah siswa pendidikan dasar pada tahun 2004 sebanyak 36,44 juta orang (siswa SD dan MI 29,46 juta dan siswa SLTP dan MTs 6,98 juta). Pada tahun 1997, jumlah siswa pendidikan dasar meningkat menjadi 39,01 juta orang (siswa SD dan MI 29,27 juta dan siswa SLTP dan MTs 9,73 juta) (Berita Fokus, 2005).

Namun demikian pelaksanaan program Wajib Belajar 9 tahun ini menemui banyak hambatan di lapangan. Hambatan-hambatan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun antara lain: keterbatasan anggaran pendidikan; kemampuan ekonomi masyarakat yang masih rendah, terutama di daerah; dan tidak adanya kerja sama yang sinergis antara berbagai instansi pemerintah dalam rangka menunjang program Wajib Belajar. Dari sisi yang lain, persentase tamatan Sekolah Dasar yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SLTP cukup besar, dan diperparah lagi oleh tingginya angka putus sekolah pada jenjang pendidikan ini yang cukup tinggi.

Permasalahan yang utama dalam mensukseskan pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun adalah bagaimana menjamin bahwa anak-anak yang telah lulus SD bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP, baik SMP biasa, SMP Terbuka atau melalui program Paket B.

Sebagian besar dari anak-anak yang mengalami dropout sesungguhnya mempunyai cukup waktu luang yang dapat dipergunakan untuk mengikuti pendidikan seandainya sarana dan bantuan tersedia untuk mereka. Ada empat kendala yang sudah diantisipasi oleh pemerintah dalam mengimplementasikan program wajib belajar 9 tahun: (1) secara kuantitatif target yang harus dikejar sangat besar terutama karena besarnya jumlah lulusan SD yang tidak melanjutkan ke SMP; (2) tingkat partisipasi sekolah pada usia SMP rendah dibandingkan dengan usia SD; (3) tingkat meneruskan dari SD ke SMP rendah, disamping rendahnya tingkat drop out baik di SD maupun SMP; (4) besarnya jumlah lulusan SD yang tidak

meneruskan ke SMP membutuhkan bantuan pemerintah untuk bisa memasuki pasar kerja.

Dengan telah dikeluarkannya Undang-undang No. 32/2004 tentang pelaksanaan Otonomi Daerah dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, maka pengelolaan pendidikan perlu penyesuaian dengan Undang-undang tersebut.

Sejalan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional serta Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 122/U/2001 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga tahun 2000 –2004 yang mengamanatkan pengelolaan pendidikan dengan pendekatan manajemen berbasis sekolah dan masyarakat sebagai kebijakan penting dalam pengelolaan berbagai program baik yang berkaitan dengan perluasan akses dalam rangka wajib belajar maupun peningkatan mutu pendidikan.

Di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri ternyata masih banyak yang buta huruf. Dari 5,7 juta penduduk ada sekitar 1,25 juta yang tidak melek huruf. Sekitar 34 persen dari jumlah penduduk itu kebanyakan tidak tamat sekolah dasar (SD). Faktor ekonomi dan fasilitas infrastruktur pendidikan dianggap sebagai biang keladi. Dengan kenyataan itu, Sulawesi Selatan menempati ranking tertinggi di Indonesia dalam prevalensi melek huruf. Kondisi ini

sungguh memprihatinkan. Sebab, keadaan itu akan menjadikan kendala dalam upaya pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Sulawesi Selatan. Kegagalan program tersebut dinilai penyebabnya adalah terjepitnya faktor ekonomi. Diketahui penduduk Sulawesi Selatan sekitar 1 juta jiwa berada di bawah garis kemiskinan. Faktor lain adalah kurang tersedianya gedung sekolah yang memadai. Akibat keterbatasan gedung sekolah ini, lanjutnya, sekitar 200.000 penduduk pada usia sekolah tidak tertampung jalur pendidikan reguler.

### **B. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, beberapa masalah yang identifikasi dalam penelitian ini adalah :

- 1 Kemampuan SDM aparat yang masih rendah.
- 2 Anggaran yang tersedia masih kurang
- 3 Peran serta masyarakat yang masih rendah
- 4 Sarana/prasarana yang belum memadai
- 5 Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang kurang mendukung

Mengingat keterbatasan waktu dan biaya serta faktor potensial dalam memecahkan masalah yang dihadapi, maka penulis membatasi/memilih dari hasil identifikasi masalah di atas yaitu pengaruh Kemampuan SDM aparat, anggaran dan peran serta masyarakat terhadap efektivitas kebijakan wajib belajar 9 tahun pada karakteristik kepulauan dan daratan utama di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar , di mana :

1. Kemampuan SDM aparat ditentukan oleh tingkat pendidikan, jenjang pendidikan dan disiplin ilmu dalam efektivitas kebijakan wajib belajar 9 tahun pada karakteristik kepulauan dan daratan utama di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar.
2. Anggaran ditentukan oleh anggaran rutin, swadaya dan hasil penerimaan retribusi dalam efektivitas kebijakan wajib belajar 9 tahun pada karakteristik kepulauan dan daratan utama di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar.
3. Peran serta masyarakat ditentukan oleh partisipasi teknis, praktis dan taktis dalam efektivitas kebijakan wajib belajar 9 tahun pada karakteristik kepulauan dan daratan utama di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar.

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah tersebut di atas, maka pertanyaan penelitian adalah :

1. Apakah kemampuan SDM aparat berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan wajib belajar 9 tahun pada karakteristik kepulauan dan daratan utama di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar?
2. Apakah anggaran berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan wajib belajar 9 tahun pada karakteristik kepulauan dan daratan utama di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar?
3. Apakah peran serta masyarakat berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan wajib belajar 9 tahun pada karakteristik kepulauan dan daratan utama di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar?

4. Apakah kemampuan SDM aparat, anggaran, dan peran serta masyarakat secara bersama-sama berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan wajib belajar 9 tahun pada karakteristik kepulauan dan daratan utama di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh kemampuan SDM aparat terhadap efektivitas kebijakan wajib belajar 9 tahun pada karakteristik kepulauan dan daratan utama di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar.
- b. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh peran serta masyarakat terhadap efektivitas kebijakan wajib belajar 9 tahun pada karakteristik kepulauan dan daratan utama di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar.
- c. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh peran serta masyarakat terhadap efektivitas kebijakan wajib belajar 9 tahun pada karakteristik kepulauan dan daratan utama di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar.
- d. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh kemampuan SDM aparat, anggaran, dan peran serta masyarakat secara bersama-sama terhadap efektivitas kebijakan wajib belajar 9 tahun pada karakteristik



kepulauan dan daratan utama di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan masukan bagi Dinas Pendidikan Kota Makassar dalam mengimplementasikan kemampuan SDM aparat, anggaran, dan peran serta masyarakat yang berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan wajib belajar 9 tahun pada karakteristik kepulauan dan daratan utama di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar.
2. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi peneliti lanjutan yang berminat untuk mengkaji lebih luas mengenai kemampuan SDM aparat, anggaran, dan peran serta masyarakat yang berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan wajib belajar 9 tahun pada karakteristik kepulauan dan daratan utama di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kebijakan Publik**

Pembangunan nasional adalah suatu proses yang terencana, terarah, bertahap, berkesinambungan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Mencapai tujuan pembangunan nasional tidak terlepas dari kebijakan publik yang merupakan aspirasi masyarakat tentang keterlibatannya dalam pembangunan nasional.

Sutarno (1998 : 141) menyatakan kebijakan publik adalah kebijakan pembangunan nasional, sehingga keterlibatan setiap lapisan masyarakat dan pemerintah merupakan andil bagi proses pembangunan dalam mencapai tujuannya. Uraian tersebut merupakan suatu pernyataan yang mengantar memahami implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik yang dimaksud adalah kebijakan-kebijakan yang melibatkan keberadaan masyarakat untuk ikut berperan serta dalam mengisi proses pembangunan nasional.

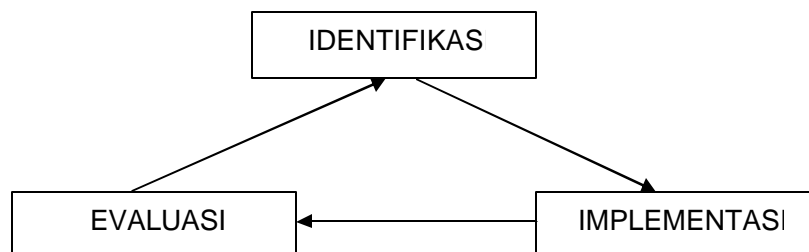
Leimendone (2000 :49) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang tertata, teratur, sesuai, konsisten dan termekanismekan menurut runtutan keberpihakan dalam berbagai implementasi yang strategis bagi pembangunan suatu bangsa.

Pengertian kebijakan yang tertata, teratur, sesuai, konsisten dan termekanismekan menurut runtutan adalah suatu model kebijakan publik

yang pada akhirnya membentuk adanya model proses perencanaan, proses pembuatan kebijakan dan proses pengembangan kebijakan.

Uraian ini secara eksplisit juga dikemukakan Specht dalam Suharto (2005:78) yang memperkenalkan model suatu perencanaan kebijakan publik yang menyatakan bahwa model proses perencanaan (*planning process model*), model proses pembuatan kebijakan (*policy making process model*) dan model proses pengembangan kebijakan (*social policy development process model*).

Pengertian tersebut diatas merupakan suatu pengantar di dalam memahami suatu rumusan model kebijakan yang dapat dianalisis sebagai suatu kebijakan yang komperatif dengan aktivitas masyarakat dan pemerintah. Seperti yang dikemukakan oleh Suharto (2005:79) bahwa model kebijakan publik dapat diformulasikan kedalam tiga bentuk kebijakan yang sering disebut model segitiga kebijakan yang intinya terdiri dari identifikasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Lebih jelasnya dapat diperlihatkan Gambar 1 di bawah ini :



Sumber : Suharto (2005:80)

Gambar 1. Model Segitiga Kebijakan

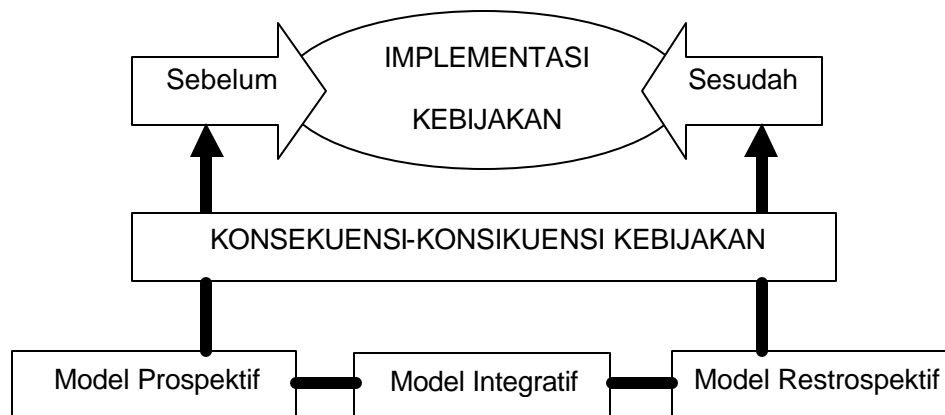
Gambar 1 di atas menjelaskan bahwa suatu kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah seyogyanya diidentifikasi berdasarkan masalah dan kebutuhannya, sehingga implementasinya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diinginkan yang dapat dievaluasi secara subyektif dan obyektif.

Pengertian kebijakan publik yang dikemukakan oleh Quade (1995:68) adalah suatu penelaahan dari identifikasi, implementasi dan evaluasi mengenai perihal publik untuk menilai bentuk-bentuk formal dan non formal dari suatu kebijakan yang memiliki konsekuensi dalam praktek-praktek penerapan kebijakan tersebut.

Maksud dari pendapat yang dikemukakan oleh Quade menegaskan bahwa suatu kebijakan publik harus representatif diterima oleh masyarakat baik secara formal maupun non formal sesuai dengan konsekuensi kebijakan-kebijakan yang terdapat dalam kebijakan publik.

Model prospektif adalah bentuk analisis kebijakan yang mengarahkan kajiannya pada konsekuensi-konsekuensi kebijakan “sebelum” suatu kebijakan diterapkan. Model ini disebut sebagai model prediktif karena melibatkan teknik-teknik peramalan.

Dunn (1991:51) menyatakan ada tiga bentuk atau model analisis kebijakan, yaitu model prospektif, model restrospektif dan model integrative. Hal ini diilustrasikan dalam model analisis kebijakan pada Gambar 2 sebagai berikut :



Sumber : Dunn (1991:51)

Gambar 2. Model Analisis Kebijakan

Model retrospektif adalah analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan “setelah” suatu kebijakan diimplementasikan. Model ini biasanya disebut sebagai model evaluatif, karena banyak melibatkan pendekatan evaluasi.

Selanjutnya model integrative adalah model perpaduan antara kedua model diatas yang kerap disebut sebagai model komprehensif atau model holistik, karena analisis dilakukan terhadap konsekuensi-konsekuensi kebijakan yang mungkin timbul, baik “sebelum” maupun “sesudah” suatu kebijakan dioperasikan. Kaitan uraian tersebut di atas terhadap penelitian ini secara umum dapat dirangkum bahwa efektivitas kebijakan wajib belajar 9 tahun pada karakteristik kepulauan dan daratan utama di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar merupakan salah satu strategis kebijakan publik yang harus dikembangkan oleh pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan Nasional.

## **B. Efektifitas**

Inti pengertian efektifitas sama dengan sosialisasi dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Sosialisasi tersebut adalah pencapaian target yang telah ditetapkan sesuai dengan realisasi yang dicapai. Ada beberapa pendapat para ahli yang mengemukakan pengertian efektifitas dalam sudut pandang prospektif disiplin keilmuannya antara lain :

- a. Hendra (200:91) mengemukakan efektifitas adalah suatu sosialisasi pelaksanaan kerja antar target dan realisasi yang ingin dicapai.
- b. Indriani (2001:52) mengemukakan efektifitas adalah sejumlah aktualisasi pelaksanaan kerja yang sesuai dengan target dan realisasi yang dicapai dan disosialisasikan dengan baik, sehingga diperoleh hasil yang optimal sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
- c. Thamrin (2002:163) mengemukakan efektifitas adalah hasil kerja yang optimal dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sesuai target dan realisasi yang ingin dicapai.

Ketiga pendapat tersebut di atas yang dapat ditarik suatu batasan bahwa efektifitas tidak terlepas dari unsur output kerja, input kerja dan tujuan yang ingin dicapai. Output kerja biasanya berupa realisasi pencapaian pelaksanaan aktivitas. Input kerja biasanya berupa target kerja yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah adanya suatu peningkatan atau manfaat yang diperoleh dari realisasi pencapaian pelaksanaan aktivitas yang melampaui target yang telah ditetapkan.

Yani (2002:82) pengertian efektifitas dalam tinjauan manajemen adalah melaksanakan aktivitas kerja sebagai unsur-unsur *output* dengan membandingkan unsur-unsur *input* dalam mencapai tujuan organisasi.

Pengertian ini mengindikasikan bahwa setiap aktivitas kerja yang dicapai sebagai suatu hasil kerja biasanya disebut output. Sedangkan aktivitas kerja yang dilakukan sesuai dengan target yang ditetapkan biasanya disebut input perbandingan antara output dan input tersebut akan menghasilkan suatu tujuan yang sesuai dengan target yang telah disosialisasikan.

Margono (2001:162) mengemukakan bahwa definisi efektifitas dalam tinjauan manajemen adalah Implementasi dari penerapan kebijakan-kebijakan manajemen baik berupa kebijakan realisasi dan target yang disosialisasikan secara serta merta dalam waktu yang singkat sesuai tujuan yang ingin dicapai. Jadi garis merah yang dapat diambil dari pemahaman efektifitas adalah pencapaian hasil optimal yang diperoleh dari realisasi dan target sebagai input dan output kerja.

Batasan mengenai pengukuran efektifitas menurut Sugeng (2001:204) diukur menurut output yang diperoleh dari realisasi yang disosialisasikan sesuai dengan target aplikasi yang ditetapkan. Secara konkrit batasan pengertian efektifitas adalah output per input suatu pelaksanaan kebijakan dalam manajemen sumberdaya manusia untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kenyataan riil yang dapat dilihat adalah hasil kerja yang terlaksana dengan baik.

Secara spesifik, pemahaman mengenai efektifitas kerja adalah efek yang ditimbulkan dari implementasi kerja yang diterapkan dan berakibat terhadap aktivitas yang dikerjakannya dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Akibat terhadap aktivitas tersebut menghasilkan keuntungan, pemanfaatan dan peningkatan yang sesuai dengan kebijakan kerja.

Pengertian tersebut mengantar memahami efektifitas kerja merupakan unsur manajemen sumberdaya manusia yang harus diperhatikan, agar setiap individu sumberdaya manusia dapat bekerja secara efektif sesuai dengan dinamika kerja.

Standar pengukuran efektifitas kerja yaitu ditentukan berdasarkan tingkat pencapaian target dan realisasi yang diperoleh. Biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase kerja dari perbandingan antara realisasi yang dicapai bagi target yang ditetapkan, seperti :

- a. Sangat Efektif, apabila realisasi per target  $\times 100\%$  menghasilkan nilai 81% - 100%.
- b. Efektif, apabila realisasi per target  $\times 100\%$  menghasilkan nilai 61%-80%
- c. Cukup Efektif, apabila realisasi per target  $\times 100\%$  menghasilkan nilai 41% - 60%.
- d. Kurang efektif, apabila realisasi per target  $\times 100\%$  menghasilkan nilai 20% - 40%.
- e. Tidak Efektif, apabila realisasi per target  $\times 100\%$  menghasilkan nilai  $< 20\%$ .



Standar pengukuran efektif ini, juga dikemukakan oleh Nachrowi (2001:87) yang menyatakan bahwa standar efektifitas suatu pekerjaan biasanya sangat efektif antara 76% - 100%, efektif antara 50% - 75% dan tidak efektif apabila dibawah 50%. Pengukuran-pengukuran ini didasari oleh cara penarikan penilaian Cochran dalam menentukan pembobotan efektifitas kerja.

Uraian-uraian di atas dapatlah dirangkum bahwa efektifitas kerja adalah perbandingan antara realisasi yang dicapai bagi target yang ditetapkan kali 100% sebagai ukuran untuk mencapai tujuan efektifitas kerja suatu organisasi.

### **C. Kemampuan SDM**

Mardiasmo (2003:184) menjelaskan bahwa kemampuan berasal dari kata *job competency* yaitu kemampuan dan kerja. Arti kemampuan yaitu kemampuan melakukan segala aktivitas secara optimal dengan segenap potensi yang dimiliki oleh manusia berupa tenaga, pikiran, perasaan dan kemauan untuk menghasilkan suatu aktivitas yang bermanfaat. Pekerjaan berarti bentuk aktivitas kerja yang dilakukan untuk mendapatkan suatu manfaat dan nilai dari aktivitas tersebut. Jadi, kemampuan adalah segala aktivitas yang dilakukan secara optimal yang melibatkan tenaga, pikiran, perasaan dan kemauan untuk melakukan aktivitas tersebut dalam menghasilkan manfaat dan nilai manfaat atas apa yang dikerjakan.

Sztompka (2003:48) menjelaskan bahwa kemampuan kerja dari individu sumberdaya manusia yang bekerja dalam organisasi kerja dengan

dinamika kerja yang kompleks dan penuh dengan persaingan untuk menunjukkan kemampuan yang unggul dan menguntungkan (*competency advantage*) yang tercermin dari kemauan daripada individu sumberdaya manusia yang memiliki jenjang pendidikan, keterampilan, pengalaman kerja dan penguasaan teknologi dalam mencapai tujuan manajemen sumberdaya manusia (MSDM).

Davidson (2001:29) pada jurnal *Performance of Employee* menyatakan bahwa kemampuan adalah segala potensi kerja optimal yang dimiliki oleh seorang pegawai yang bekerja dalam suatu instansi atau organisasi, kemampuan memainkan peranan penting dalam mencapai tujuan organisasi. Kemampuan sangat didukung oleh unsur pendidikan, keterampilan, pengalaman kerja dan penguasaan teknologi. Keempat keterkaitan tersebut menjadi unggulan bagi seorang pegawai dalam menghadapi dinamika kerja yang semakin kompleks dan kompetitif.

Pendapat di atas, dapat ditegaskan bahwa kemampuan kerja bagi pegawai sangat berperan dalam mencapai tujuan organisasi. Andil tingkat pendidikan, keterampilan, pengalaman kerja dan penguasaan teknologi merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh pegawai yang memiliki kemampuan dalam melakukan aktivitas kerja secara dinamis dan statis sesuai kebutuhan dinamika kerja.

Anggito (2000:102) menyatakan kemampuan sangat diperlukan untuk meningkatkan prestasi kerja individu sumberdaya manusia. Individu yang memiliki kemampuan menjadi aset bagi suatu instansi dalam mencapai

tujuan organisasi. Kemampuan yang dimaksud didasarkan menurut tingkat pendidikan, keterampilan, pengalaman kerja dan penguasaan teknologi yang dimiliki untuk menghasilkan suatu aktivitas kerja yang memberikan manfaat. Apabila kemampuan tersebut berhasil dijalankan dan diselesaikan dengan baik, maka individu sumberdaya manusia dianggap berkualitas. Sumberdaya manusia yang berkualitas adalah sumberdaya manusia yang dapat dikatakan handal, mandiri dan profesional menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam bekerja.

Menunjukkan bahwa kemampuan seseorang sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan yang telah ditamati, keterampilan kerja yang dimiliki, pengalaman kerja dan penguasaan teknologi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan pelayanan kerja yang diberikan kepada masyarakat setiap hari.

Marnin (2000:129) kemampuan adalah kemampuan yang dimiliki oleh individu sumberdaya manusia sesuai dengan kemandirian yang terdapat dalam diri individu sumberdaya manusia, respon terhadap aktivitas yang dilakukan, menginginkan persaingan yang sehat, bekerjasama dengan mitra kerja dan komunikatif dalam mengembangkan aktivitas kerja setiap hari. Sehingga sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan menjadi prioritas dalam dunia kerja untuk pencapaian tujuan organisasi yang berdasarkan pada jenjang pendidikan, keterampilan, pengalaman kerja dan penguasaan teknologi.

Malaway (1999 : 17) menyatakan bahwa kemampuan kerja memberikan makna peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang handal yang dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk pemberdayaan organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi. Saat ini telah berkembang menjadi obyek kerja yang bersifat multidimensi, mencakup berbagai aspek kehidupan manusia berdasar pada jenjang pendidikan, keterampilan, pengalaman kerja dan penguasaan teknologi yang dimiliki.

Pendapat ini merupakan orientasi, strategi dan kebijakan pembangunan yang mengarahkan kemampuan sumberdaya manusia ditentukan dari tingkat pendidikan yang diamati, keterampilan, pengalaman kerja yang dimiliki dan penguasaan teknologi dari masing-masing sumberdaya manusia.

Indriani (2001:39) mengemukakan bahwa kemampuan dari individu sumberdaya manusia diperlukan agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan peranan, fungsi dan wewenang sebagai sumberdaya manusia. Pentingnya kemampuan dalam suatu organisasi SDM sangat ditentukan oleh keterampilan kerja yang diterapkan, pengalaman kerja yang dimiliki, tingkat pendidikan yang ditamati dan penguasaan teknologi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai individu sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan.

Budiarto (1999:21) menyatakan bahwa ada beberapa aspek yang mencakup dalam pengembangan sumberdaya manusia sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan yaitu :

1. Pembangunan harus memberikan penekanan pada kesesuaian tingkat pengetahuan yang tinggi dari masing-masing individu sumberdaya manusia dalam mencapai tujuan organisasi.
2. Pembangunan mengandung arti pemberdayaan masyarakat melalui keterampilan kerja yang diterapkan dalam mencapai tujuan organisasi.
3. Pembangunan mengandung pengertian memiliki pengalaman kerja dalam bidang kerja yang ditekuni.
4. Pembangunan mengandung arti menguasai teknologi seiring dengan kemajuan.

Keempat aspek tersebut merupakan implementasi di dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengevaluasian dan pengkajian tugas pokok dan fungsinya dalam kualitas sumberdaya manusia yang mengarah kepada peningkatan prestasi kerja pegawai.

Winarti (2003:159-163) menyatakan bahwa peningkatan kualitas sumberdaya manusia sangat ditentukan oleh kemampuan sumberdaya manusia itu sendiri. Yang dimaksud dengan kemampuan berupa jenjang pendidikan, keterampilan kerja dan penguasaan teknologi yang dimiliki. Lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pendidikan

Pendidikan dalam manajemen sumberdaya manusia merupakan suatu yang sangat esensial dan memainkan peranan penting dalam berbagai pelaksanaan aktivitas kerja organisasi SDM. Pentingnya pendidikan ini bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, agar

mampu bekerja sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu sumberdaya manusia yang mempunyai jenjang pendidikan. Hal tersebut menjadi fokus utama dari pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : "...ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa ...", secara eksplisit Negara Republik Indonesia telah memberikan hak dan peluang bagi setiap warga negara untuk memperoleh dan mengenyam pendidikan, dan itu dipertegas pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Nasional. Sistem penyelenggaraan pendidikan ini akan mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki pendidikan, akan membentuk perilaku masyarakat yang memiliki budi pekerti luhur, Beriman dan Bertakwa Kepada Tuhan YME sesuai dengan kemampuan yang dimiliki untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Esensi dari pendidikan dalam kemampuan yang menjadi tolak ukur dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terdiri dari :

- a. Jenjang pendidikan yang telah diamati (SD, SLTP, SLTA, S1, S2 dan S3). Jenjang ini memberikan perbedaan dari kualitas masing-masing individu yang memiliki tingkat pengetahuan.
- b. Memiliki wawasan yang luas berupa pengadopsian berbagai informasi IPTEK yang mendukung kualitas individu sumberdaya manusia.

- c. Memiliki rasa percaya diri yang membentuk pribadi seseorang merasa mampu, mandiri dan memiliki kapabilitas, akibat pemahaman pendidikan yang ditekuninya.
- d. Membentuk karakter sumberdaya manusia yang bertujuan untuk mencerdaskan kualitas sumberdaya manusia dan membentuk karakter individu yang berpendidikan.

Inti dari uraian di atas mengandung empat unsur yang harus dipenuhi yaitu pendidikan, keterampilan kerja, pengalaman dan penguasaan teknologi yang merupakan basis dalam pengembangan kemampuan individu sumberdaya manusia dalam mencapai tujuan pengembangan manajemen sumberdaya manusia.

## 2. Keterampilan

Keterampilan berperan penting dalam menetapkan kualitas sumberdaya manusia. Keterampilan individu sumberdaya manusia dapat ditentukan dari : (1) tingkat penguasaan bidang tugas, (2) kehandalan menyelesaikan tugas pokok tepat waktu, (3) cakap dalam keterampilan proses kerja dan (4) memiliki keahlian dalam aplikasi tugas pokok. Tugas pokok tersebut berupa perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengevaluasian dan pengkajian.

## 3. Pengalaman Kerja

Pengalaman kerja yang dimiliki oleh individu sumberdaya manusia sangat mempengaruhi aktivitas kerjanya. Makin berpengalaman dalam menjalankan tugas pokoknya, maka makin mudah dalam

memberikan kecepatan, kemudahan, ketepatan dan keterpaduan dalam memberikan pelayanan. Tentu ini berbeda dari masing-masing individu sumberdaya manusia tanpa memiliki pengalaman kerja. Unsur yang menentukan pengalaman kerja adalah masa kerja, uraian kerja, budaya kerja dan bentuk kerjasama yang dikembangkan selama ini dalam meningkatkan pencapaian tujuan organisasi.

#### 4. Penguasaan Teknologi

Teknologi merupakan suatu kesatuan yang integral didalam menciptakan kualitas sumberdaya manusia. Pentingnya menguasai teknologi tidak terlepas dari indikator teknologi berupa sarana kemajuan, transformasi (pemindahan suatu perubahan yang maju), aset dalam pencapaian tujuan dan inovasi dalam kemajuan. Intinya yaitu menekankan bahwa teknologi merupakan suatu sarana dalam memajukan kualitas sumberdaya manusia, sesuai dengan kemampuan melakukan transformasi teknologi (alih teknologi modern), yang menjadi aset investasi individu yang mampu menguasai IPTEK dan menjadi inovasi bagi perkembangan dunia pendidikan dan teknologi.

Pendapat-pendapat di atas, menjadi kesimpulan bagi peneliti untuk memahami bahwa inti dari kemampuan SDM aparat yang dikembangkan, sehubungan dengan aktivitas kerja aparat dalam peningkatan efektivitas kebijakan wajib belajar 9 tahun pada karakteristik kepulauan dan daratan utama di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar yang bertumpu kepada tingkat pendidikan, keterampilan, pengalaman



kerja dan penguasaan teknologi yang dimiliki dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari.

#### **D. Anggaran**

Loys (2004:13) anggaran merupakan pembiayaan dan pendanaan yang memainkan peranan penting dalam suatu kegiatan atau penyelenggaraan. Manfaat dan fungsi anggaran adalah untuk memperlancar proses terlaksananya suatu kegiatan dalam organisasi.

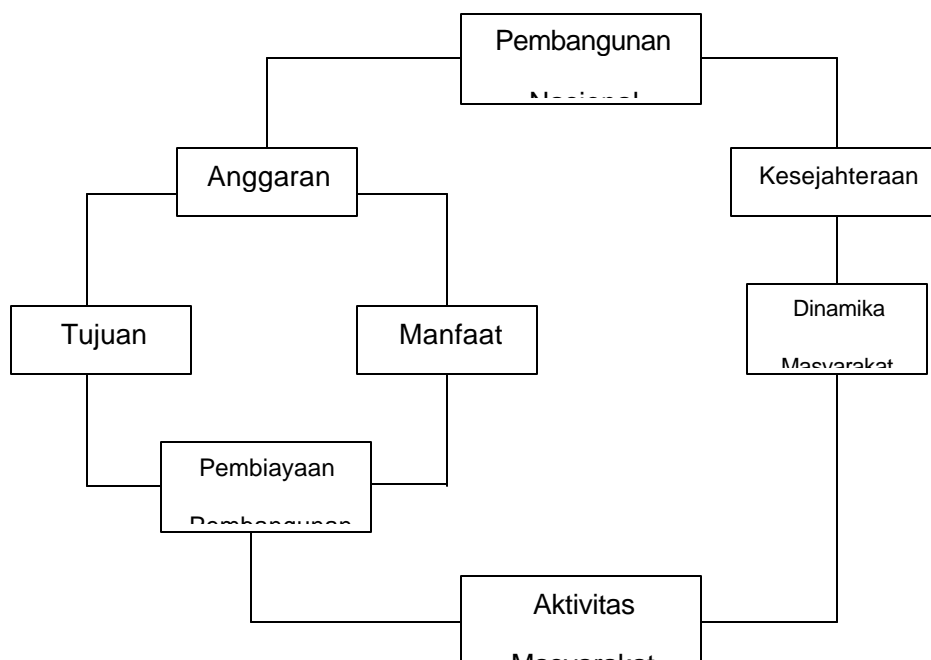
Uraian yang dikemukakan oleh Loys memberikan batasan anggaran merupakan nilai pembiayaan yang sesuai dengan nilai material suatu penyelenggaraan yang tertuang dalam anggaran sesuai laporan keuangan, neraca, rugi laba yang menjelaskan berbagai pos-pos pembiayaan.

Ndhara (2004:146) menyatakan suatu proses pembangunan memerlukan adanya anggaran pembangunan. Anggaran pembangunan dapat diperoleh berdasarkan sumber-sumber pendanaan dan pos-pos pengeluaran sesuai alokasi kebutuhan anggaran yang diperlukan dari masing-masing sektor pembangunan.

Sektor pembangunan merupakan sektor yang memerlukan adanya pendanaan atau pembiayaan yang diperlukan agar kelangsungan atau kesinambungan dari suatu proses pembangunan berjalan secara terencana, terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Menurut Robbinson (1998:392) tahapan anggaran pembiayaan dan pendanaan suatu pembangunan disesuaikan atas dasar tujuan dan manfaat anggaran dikeluarkan untuk pembiayaan pembangunan agar

berkesinambungan aktivitas masyarakat berjalan sesuai dengan tujuan dinamika masyarakat yang menghasilkan kesejahteraan sebagai proses dari implementasi pembangunan nasional. Sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 3 mengenai diagram Ribinson sebagai berikut:



Sumber : Robinson (1998:393)

Gambar 3. Diagram anggaran Robinson

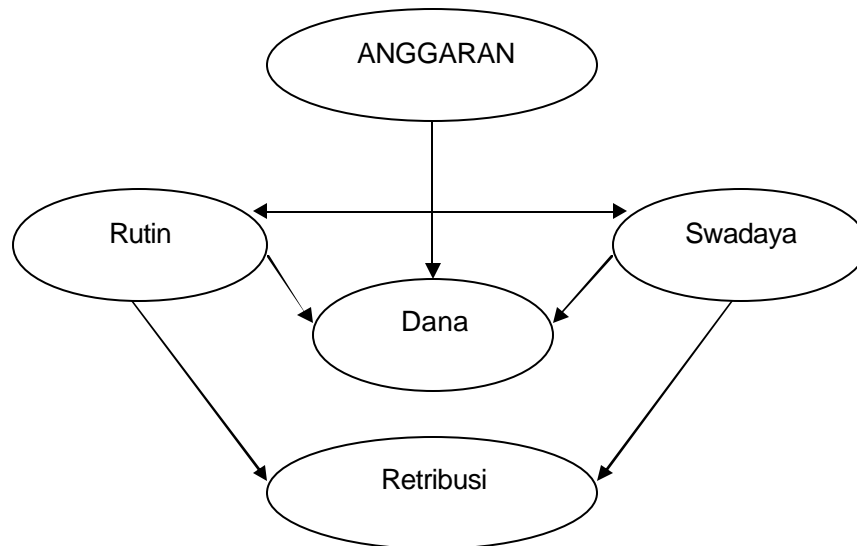
Menurut Purwatiningsih (2002:198) anggaran untuk pembiayaan pembangunan pemerintah daerah, dialokasikan berdasarkan dana anggaran rutin, anggaran swadaya dan anggaran hasil penerimaan retribusi yang merupakan anggaran yang diperlukan untuk berbagai aktivitas pembangunan pada berbagai bidang sektor pemerintahan dan kemasyarakatan. Secara garis besarnya, anggaran rutin adalah anggaran

yang didanai atau dibiayai atas berbagai pengeluaran dan pembiayaan yang dilakukan setiap bulan sesuai dengan pelaporan dan pertanggungjawabannya dilakukan setiap tahun. Anggaran swadaya adalah anggaran partisipatif yang diperoleh dari berbagai pihak baik pemerintah maupun non pemerintah yang bersifat bantuan partisipatif. Sedangkan anggaran hasil penerimaan retribusi adalah anggaran yang diperoleh dari hasil bagi retribusi pajak, retribusi hasil usaha, retribusi umum dan retribusi perizinan. Kesemua anggaran tersebut digunakan untuk menutupi berbagai pembiayaan dan pendanaan sektor-sektor pemerintah dan publik.

Peltham (2000:282) anggaran pada umumnya ditentukan berdasarkan penetapan tingkat penerimaan uang, pemasukan kas, anggaran, rencana kebutuhan kas, pengeluaran kas, perbandingan taksiran kas, kebutuhan pembiayaan yang dianggarkan dan anggaran kas finansial. Anggaran-anggaran tersebut pada dasarnya merupakan anggaran esensial, yang diperlukan dalam pengalokasian suatu dana pembangunan. Dana pembangunan tersebut kemudian terdistribusikan dalam anggaran APBN, kemudian APBD yang seterusnya dianggarkan berdasarkan tingkat esensi kebutuhan pemerintah atas dana anggaran rutin, anggaran swadaya dan anggaran hasil bagi dari penerimaan retribusi.

Warouw (2002:89) juga menyatakan bahwa anggaran memainkan peranan penting dalam pembiayaan suatu pemerintahan daerah. Anggaran Pemerintahan yang dimaksud adalah anggaran rutin dan anggaran pegawai, anggaran swadaya yang dapat diperoleh dari masyarakat sesuai tingkat

partisipasi dan anggaran hasil bagi retribusi yang telah ditetapkan tingkat persentasenya. Secara garis besar, bagan anggaran alokasi rutin, swadaya sampai hasil bagi penerimaan retribusi, sebagaimana ditunjukkan pada gambar dibawah ini :



Sumber : Warouw (2002:89)

Gambar 4. Alokasi Anggaran

Gambar di atas menunjukkan bahwa anggaran merupakan pemberian pembiayaan dan pendanaan sesuai dengan permintaan dana alokasi yang diperoleh dari dana rutin yang telah ditetapkan, dana swadaya masyarakat dan dana hasil pembagian retribusi yang digunakan untuk proses kegiatan atau penyelenggaraan suatu pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Secara eksplisit, pengertian pembagian anggaran yang dibagi kedalam tiga jenis bentuk penganggarannya, yang terdiri dari anggaran rutin, anggaran swadaya dan anggaran hasil penerimaan retribusi, mengantar

memberikan suatu defenisi tiga jenis anggaran tersebut yang dikemukakan oleh Martoyo (1999:53) sebagai berikut :

1. Anggaran rutin adalah anggaran pembiayaan dan pendanaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang berasal dari dana APBN atau APBD yang dikeluarkan setiap bulan dan dipertanggungjawabkan setiap tahunnya sesuai dengan daftar pengisian proyek.
2. Anggaran swadaya adalah anggaran pembiayaan dan pendanaan yang dipungut atau diperoleh dari dana kontribusi atau sumbangan yang berasal dari masyarakat sebagai partisipasi dalam pembangunan khususnya pembiayaan pembangunan umum dan pembangunan khusus.
3. Anggaran hasil pembagian kontribusi adalah anggaran pembiayaan dan pendanaan yang diperoleh dari hasil pemungutan fasilitas sarana dan prasarana yang dibangun oleh pemerintah dan digunakan oleh masyarakat secara individu atau kelompok masyarakat yang dilakukan pemungutan untuk peningkatan pendapatan asli daerah yang digunakan dalam pembiayaan anggaran pembangunan.

Uraian-uraian tersebut di atas, secara jelas dapat dikatakan bahwa anggaran pembangunan merupakan anggaran pemberian dana alokasi untuk berbagai kontribusi pembangunan, dimana sumber anggaran yang diperoleh berasal dari dana rutin dari APBN dan APBD, anggaran swadaya dari masyarakat berupa iuran atau biaya pemungutan langsung atau tidak

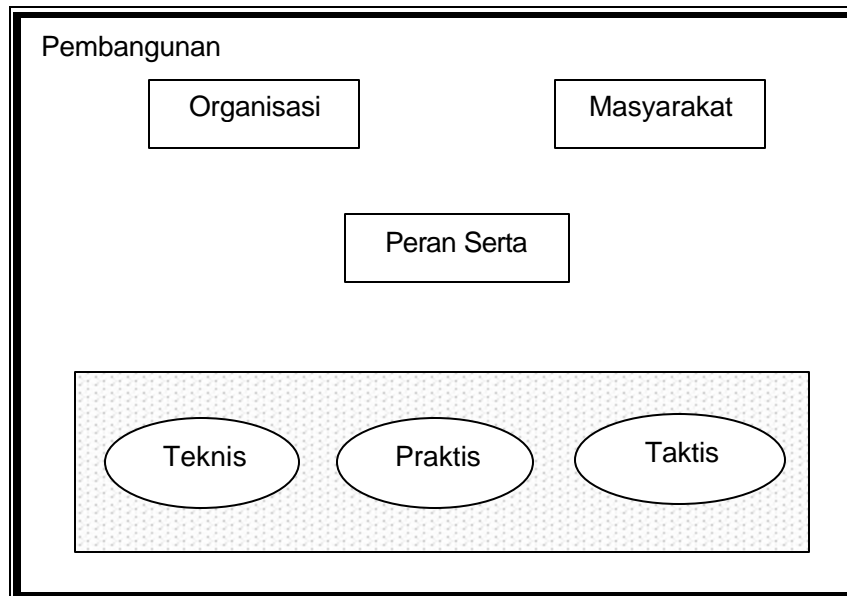
langsung secara sukarela dan biaya hasil bagi pemungutan retribusi suatu daerah termasuk retribusi umum dan retribusi perizinan.

### **E. Peran Serta Masyarakat**

Peran serta sesungguhnya merupakan konsep dari konteks keikutsertaan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas yang melibatkan keberadaannya dalam mencapai tujuan dari masyarakat itu sendiri. Pengertian ini dikemukakan oleh Sutarman (1999:211) yang memberikan batasan jelas bahwa peran serta berasal dari kata istilah *participation* artinya turut serta dalam suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Jadi, peran serta masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam menyukseskan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat untuk tujuan bersama.

Istilah “peran serta” sering diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas yang dilakukan sebagaimana dikemukakan oleh Tunggal (1997:69) bahwa peran serta adalah kesiapan mental dan emosional orang-orang dalam satu kelompok yang mendorong untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok dan berbagai tanggungjawab dalam mencapai tujuan tersebut. Keberhasilan mencapai tujuan organisasi ditentukan oleh sejauhmana kesiapan anggota dalam suatu organisasi, baik secara mental dan emosional untuk melibatkan diri mereka dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Peran serta tersebut dapat dilakukan oleh individu ataupun oleh kelompok tertentu berupa pemberian kontribusi yang tepat terhadap pencapaian tujuan

organisasi sesuai dengan peran serta teknis, praktis dan taktis. Lebih jelasnya dapat dilihat diagram peran serta masyarakat dibawah ini :



Sumber : Tunggal (1997:70)

Gambar 5. Peran Serta Masyarakat

Gambar 5 di atas merupakan gambar implementasi peran serta masyarakat yang biasanya berupa peran serta teknis, praktis dan taktis yang secara konkrit berupa peran serta dalam bentuk dana, tenaga dan pikiran dari setiap individu atau kelompok masyarakat terhadap suatu bentuk peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Sumarto (2000:74) mengemukakan bahwa pengertian "peran serta masyarakat" berasal dari tiga kata yaitu peran serta dan masyarakat. Peran serta berarti keikutsertaan setiap individu untuk melaksanakan aktivitas yang dikerjakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan masyarakat berarti individu yang melakukan aktivitas tersebut sesuai dengan

keikutsertaannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Secara menyeluruh, peran serta masyarakat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh individu dari suatu masyarakat dalam turut serta melaksanakan kepentingan masyarakat sesuai dengan tujuan peran praktis, teknis dan taktis dari masyarakat.

Beberapa pengertian peran serta masyarakat antara lain menurut Muzakir (1999:14) adalah kesediaan masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan bersama untuk membantu keberhasilan program pembangunan, tanpa mengorbankan kepentingannya, sesuai dengan kebutuhan peran yang dimainkannya baik secara taktis, teknis dan praktis.

Sependapat dengan hal tersebut di atas, Adjid (1985:113) mengemukakan beberapa kriteria yang tersimpul dalam istilah pengertian peran serta yaitu :

1. Peran serta mengacu kepada adanya beberapa subyek yang berintegrasi, seperti individu, masyarakat, organisasi perekonomian dan pemerintahan, yang masing-masing mempunyai keleluasaan mengambil keputusan sendiri tetapi terikat dalam suatu ikatan solidaritas semu.
2. Terdapat suatu kesukarelaan dan kesadaran dari individu untuk menjalankan peranan yang diberikan oleh organisasi secara ikhlas.
3. Peran serta bermakna kepada keterlibatan anggota dalam suatu kegiatan.
4. Adanya kelompok sasaran (target group) dari suatu kegiatan yang menjadi ajang partisipasi.

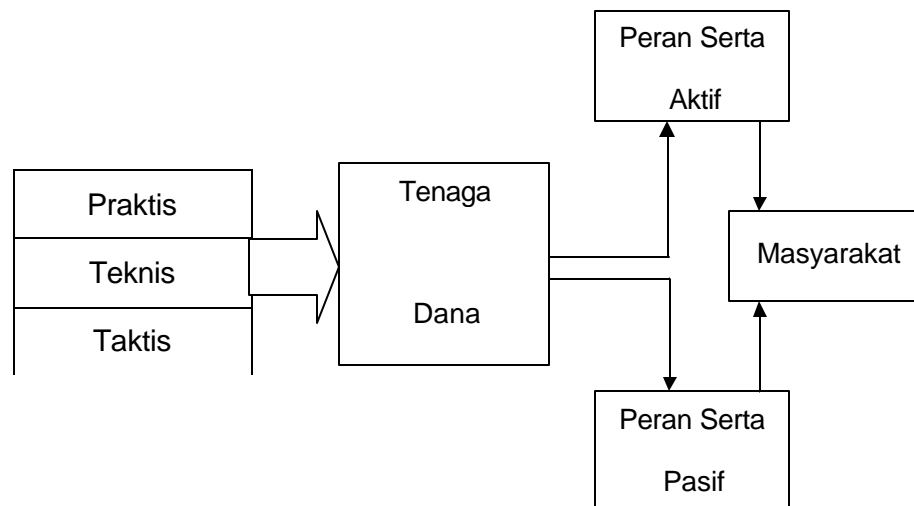


Sesungguhnya peran serta mengandung beberapa hal yang berkenaan dengan pola interaksi kelompok atau individu dalam suatu organisasi untuk merumuskan dan mengambil keputusan sendiri dalam rangka mencapai tujuan tertentu dengan melibatkan seluruh komponen organisasi tersebut secara sukarela dalam berpartisipasi.

Pandangan lain tentang definisi partisipasi dikemukakan oleh Pamudji (1985:7) menyatakan bahwa peran serta adalah ikut sertanya suatu kesatuan untuk mengambil bagian dalam aktivitas yang dilakukan oleh suatu susunan yang lebih besar. Peran serta mencakup kerjasama dari semua yang terkait dan merupakan suatu tempat terjadi kesepakatan, harapan-harapan, persepsi-persepsi serta sistem komunikasi. Selanjutnya dikatakan bahwa kemampuan pendidikan akan mempengaruhi perilaku dan cara seseorang dalam partisipasi. Dengan demikian maka peran serta masyarakat pada hakekatnya adalah keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam proses pencapaian tujuan teknis, praktis dan taktis yang dilakukan oleh pribadi-pribadi atau individu atau kelompok yang diorganisasikan, serta memutuskan tujuan dengan penuh tanggungjawab yang dijiwai oleh rasa turut memiliki.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut diketahui bahwa peran serta masyarakat adalah suatu bentuk keikutsertaan baik secara fisik maupun emosional yang menjadi salah satu syarat keberhasilan pengelolaan suatu organisasi. Hal tersebut yang kemudian mendasari beragamnya bentuk peran serta masyarakat dalam suatu bentuk kegiatan pembangunan.

Menurut Norton (1978:18) peran serta masyarakat dalam pembangunan dapat dibedakan menjadi tiga jenis bentuk partisipasi yaitu peran serta teknis, praktis dan taktis. Dengan demikian maka bentuk peran serta seseorang dapat diukur dari keterlibatan mereka dalam memberikan bantuan baik dalam bentuk dana, tenaga dan pikiran seseorang atau kelompok tertentu kepada organisasi. Jadi peran serta adalah merupakan suatu proses keikutsertaan seseorang atau kelompok orang yang secara sadar dalam bentuk kerjasama atau kegiatan dengan mengharapkan manfaat dan kesempatan dari hasil kerjasama. Lebih jelasnya ditunjukkan pada gambar dibawah ini :



Sumber : Norton (1978:19)

Gambar 6. Bentuk Peran Serta Masyarakat

Slamet (1989:81) mengklasifikasikan peran serta berdasarkan aspek tingkat kesukarelaan seseorang yaitu :

1. Peran serta bebas terjadi bila seseorang individu melibatkan dirinya secara sukarela didalam suatu kegiatan partisipatif tertentu. Peran serta bebas terdiri dari : (1) peran serta spontan, terjadi bila seseorang individu mulai berpartisipasi berdasarkan pada keyakinannya tanpa dipengaruhi melalui penyuluhan atau ajakan lembaga-lembaga atau oleh orang lain (2) peran serta terbuka, terjadi bila seseorang individu mulai berpartisipasi berdasarkan pada keyakinan dan dipengaruhi melalui penyuluhan atau ajakan lembaga-lembaga atau oleh orang lain.
2. Peran serta terpaksa dapat terjadi dalam berbagai cara yaitu (1) peran serta terpaksa oleh hukum, terjadi bila seseorang dipaksa melalui aturan dan hukum dalam kegiatan tertentu akan tetapi bertentangan dengan keyakinan dan tujuan-tujuan mereka, (2) peran serta terpaksa karena keadaan kondisi sosial ekonomi.

Menurut Slamet (1989):55) arti peran serta masyarakat dalam pembangunan menurut hasil rumusan PBB menyatakan bahwa dalam berbagai resolusi PBB secara jelas menunjukkan cara memandang peran serta masyarakat dalam pembangunan terdiri dari (1) pembagian massal dari hasil-hasil pembangunan, (2) sumbangan massal terhadap jerih payah pembangunan dan (3) pembuatan keputusan di dalam pembangunan. Peran serta dalam konteks pembangunan merupakan keterlibatan aktif dan bermakna dari massa penduduk pada tingkatan yang berbeda yaitu : (1) dalam proses pembentukan keputusan untuk menentukan tujuan ke masyarakat dan pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan

tersebut, (2) pelaksanaan program-program dan proyek-proyek secara sukarela dan (3) pemanfaatan hasil-hasil dari suatu program atau suatu proyek.

Menurut Muzakir (1999:35) untuk masyarakat Indonesia, bentuk peran serta seseorang dapat muncul atau dilakukan secara bersama-sama ataupun secara mandiri. Munculnya peran serta dapat bersifat *local specific*, karena perbedaan adat dan kebiasaan tertentu, perbedaan tingkat pengetahuan yang dimiliki individu sehingga macam dan tingkat partisipasi akan juga berbeda. Bentuk dan jenis partisipasi yaitu : (1) peran serta teknis (*technique participation*), (2) peran serta praktis atau *practice participation* dan (3) peran serta taktis (*tactic participation*).

Berdasarkan pernyataan tersebut, diketahui bahwa masyarakat dalam mewujudkan peran sertanya baik sendiri atau berkelompok terhadap suatu kegiatan dapat berupa sumbangan pemikiran, ide-ide dan gagasan yang dianggap dapat merubah suatu bentuk kebijakan tertentu. Selain itu juga masyarakat mewujudkan partisipasinya dalam bentuk pemberian sumbangan tenaga dimana masyarakat dapat secara langsung berperan dalam mewujudkan ide-ide dan gagasan yang diinginkan. Bentuk lain sering dilakukan adalah memberikan sumbangan materi berupa alat, barang dan bahkan berupa dana untuk mendukung pelaksanaan suatu kegiatan.

Selain bentuk partisipasi tersebut di atas, hal yang sering juga dilakukan adalah partisipasi secara tidak langsung yaitu berupa pemberian sugesti dan dorongan moral terhadap unsur-unsur yang berperan secara

langsung dalam suatu kegiatan. Atau sumbangan yang diberikan dalam bentuk moral. Dijelaskan pula bahwa partisipasi dapat dalam bentuk (1) konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa, (2) sumbangan spontan berupa uang dan barang, (3) sumbangan dalam bentuk kerja, yang biasanya dilakukan oleh tenaga ahli setempat, (4) membangun proyek komunitas yang bersifat otonom dan (5) mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan donornya berasal dari sumbangan dari individu/instansi yang berada di luar lingkungan tertentu (dermawan pihak ketiga).

Theresia (2002:24) mengemukakan bahwa partisipasi dapat berupa “pembuat keputusan yang mengikutsertakan kelompok atau masyarakat luas yang terlibat dalam bentuk saran, pendapat, barang, keterampilan, atau jasa.

Bertitik tolak dari pandangan ini, pemahaman tentang konsep partisipasi perlu diperluas tidak hanya ditekankan dalam bentuk pemberian dana dan barang sebagai masukan instrumental, melainkan perlu dikembangkan pula berbagai bentuk partisipasi lain seperti partisipasi dalam hal waktu, pemikiran dan gagasan, kepercayaan dan kemauan.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang telah pernah dilakukan dan relevan dengan penelitian ini, yaitu oleh Ambo Lau (2005) dari Universitas Negeri Makassar (UNM), dengan judul penelitian: *“Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan untuk Menunjang Wajib Belajar 9 Tahun pada SMP Negeri Kota Makassar”*. Fokus penelitian adalah upaya sekolah (para kepala sekolah, guru dan tata usaha SMP) dalam menggalang partisipasi masyarakat untuk

berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan dalam menunjang wajib belajar. Penelitian ini tidak untuk menguji hipotesis, tetapi mendeskripsikan kecenderungan dari pelaksanaan masing-masing dimensi kajian.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam program sekolah yang dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pada SMP Negeri Kota Makassar masih tergolong dalam kategori rendah. Hal ini disebabkan oleh karena kurang terbukanya pihak sekolah dan kurang aktifnya masyarakat mencari informasi terhadap pengelolaan dan pengembangan SMP Negeri di Kota Makassar

Penelitian Ambo Lau mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya adalah bahwa faktor partisipasi masyarakat menjadi salah satu pertimbangan penting dalam membantu pemerintah mewujudkan tujuan pendidikan dan pelaksanaan kesempatan wajib belajar 9 tahun kepada seluruh masyarakat. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian melihat faktor peran serta atau partisipasi masyarakat sebagai variabel bebas (independen) yang berpengaruh dan dilihat hubungannya terhadap efektifitas kebijakan program, sedangkan penelitian Ambo Lau melihat variabel partisipasi masyarakat sebagai variabel yang dianalisis secara mandiri dan bukan merupakan hubungan kausal.

Selanjutnya penelitian dari Zulkarnaen (2001) dari Universitas Negeri Makassar (UNM) yang berjudul: "*Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengajaran pada SD dan SLTP Negeri di Kabupaten Gowa*". Penelitian Zulkarnaen menyimpulkan bahwa salah satu faktor yang

berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengajaran pada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) adalah ketersediaan sarana fasilitas dan penggunaan media pengajaran yang tepat dalam kelas, di mana disarankan bahwa kecukupan anggaran sekolah akan sangat membantu menyediakan sarana yang dibutuhkan tersebut. Persamaan dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian yang akan dilakukan sama-sama menggunakan variabel terikat efektivitas, sementara yang berbeda adalah variabel independen. Penelitian ini lebih berfokus pada upaya untuk mengetahui efektivitas kebijakan wajib belajar, sementara pada penelitian Zulkarnaen lebih menekankan pada efektivitas pengajaran dalam kelas pada tingkat SD dan SLTP.

### **G. Kerangka Pemikiran**

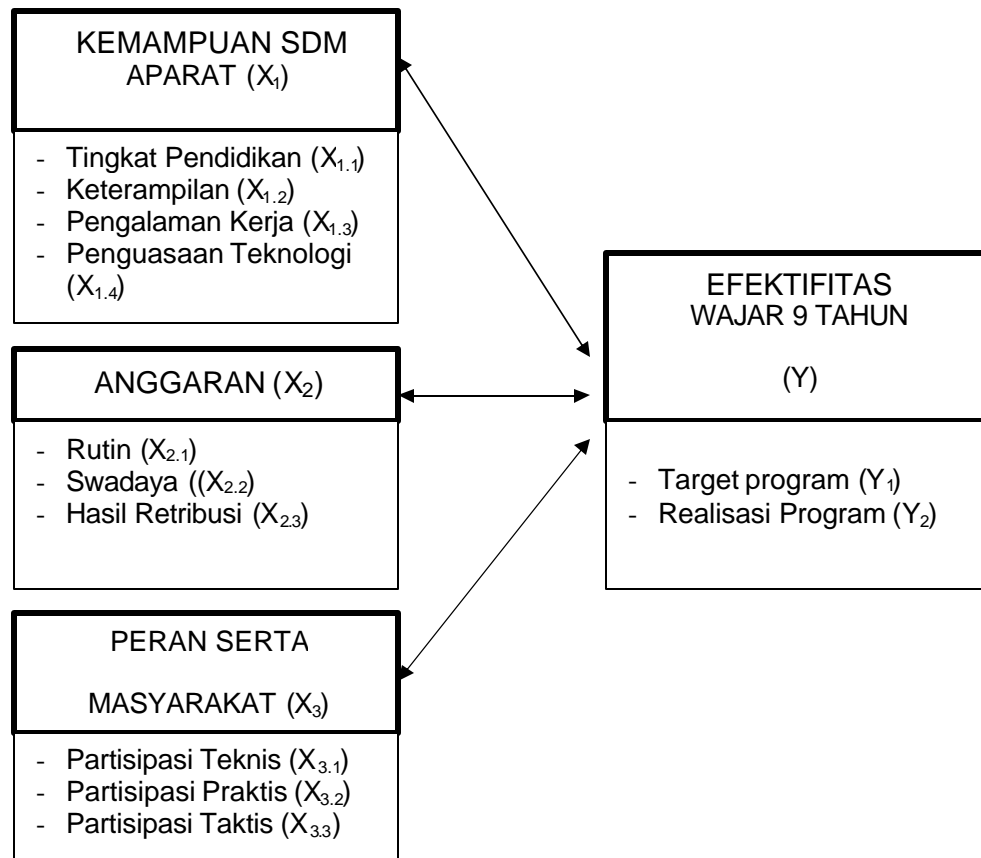
Sejak dikeluarkannya Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional hingga saat ini (2003), pembangunan sistem pendidikan nasional telah mendapat perhatian yang cukup besar. Perluasan kesempatan pendidikan di tingkat SLTP terus dilakukan dari satu periode pembangunan lima tahunan ke periode lainnya yang dikendalikan secara terpusat dan hasilnya juga cukup mengesankan bila dilihat secara kuantitatif terutama jika dilihat dari meningkatnya angka partisipasi pendidikan di tingkat SLTP. Program Wajib Belajar tersebut disamping telah mendorong perluasan kesempatan belajar ditingkat SD dan SLTP, juga telah mendorong perluasan kesempatan belajar pada jenjang-jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun disatu sisi memberikan hasil yang menggembirakan, tetapi dilain pihak masih memerlukan perhatian khusus karena masih besarnya anak usia 13-15 tahun yang belum tertampung di sekolah, sehingga masih dibutuhkan penyediaan sarana dan prasarana belajar baik melalui penambahan UGB dan RKB serta penyediaan alternatif layanan pendidikan lainnya. Disamping upaya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar, masalah mutu pendidikan di SLTP memerlukan penanganan sungguh-sungguh. Berbagai pelatihan/penataran sudah dilaksanakan untuk meningkatkan mutu guru, demikian juga peningkatan penyediaan sarana/prasarana. Namun daya serap siswa, NEM dan berbagai indikator mutu yang lain menunjukkan bahwa mutu pendidikan SLTP masih memerlukan peningkatan secara sungguh-sungguh.

Oleh sebab itu bentuk-bentuk pelatihan/penataran guru masih perlu dilanjutkan dengan mendesain lebih matang dan terarah, serta penyediaan sarana/prasarana untuk meningkatkan mutu pendidikan juga perlu dikaji lagi sehingga lebih menyesuaikan kepada kebutuhan riil disekolah. Sejalan dengan itu penyempurnaan kurikulum masih perlu dilakukan sehingga proses pembelajaran di sekolah menjadi menarik dan mampu memupuk kreatifitas murid. Program perluasan kesempatan belajar, peningkatan mutu pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat sepenuhnya diserahkan kepada wilayah/ daerah, hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 32/2004 tentang pelaksanaan otonomi daerah dan undang-undang No. 33/2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah Pusat dan Daerah, yang berdampak



kepada perubahan struktur organisasi baik di pusat maupun ditingkat propinsi dan kabupaten/ kota. Berdasarkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan wajib belajar 9 tahun pada karakteristik kepulauan dan daratan utama di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar.



Gambar 7. Kerangka Pemikiran

## H. Hipotesis penelitian

1. Kemampuan SDM aparat berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan wajib belajar 9 tahun pada karakteristik kepulauan dan daratan utama di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar.
2. Anggaran berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan wajib belajar 9 tahun pada karakteristik kepulauan dan daratan utama di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar.
3. Peran serta masyarakat berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan wajib belajar 9 tahun pada karakteristik kepulauan dan daratan utama di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar.
4. Kemampuan SDM aparat, anggaran, dan peran serta masyarakat secara bersama-sama berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan wajib belajar 9 tahun pada karakteristik kepulauan dan daratan utama di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Desain Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian survei yang diambil dari data primer dan data sekunder. Desain penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yang menjelaskan mengenai analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan wajib belajar 9 tahun pada karakteristik kepulauan dan daratan utama di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilaksanakan pada Sekolah Dasar di Kecamatan Ujung Tanah (wilayah Kepulauan dan Daratan Utama) di Kota Makassar. Dengan waktu penelitian kurang lebih 2 bulan.

#### **C. Populasi dan Sampel**

##### **1. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah meliputi seluruh kepala sekolah dan guru SD dan SMP di Kecamatan Ujung Tanah berjumlah 206 orang, yang terdiri dari 130 orang PNS dan 76 orang tenaga honorer.

## 2. Sampel

Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *stratified proportionate random sampling*. Pengambilan sampel dengan menggunakan rumus Taro Yamane (Rakhmat, 1998 : 82) sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{N.d^2 + 1}$$

Dimana :

n = Sampel

N = Populasi

d<sup>2</sup> = Presisi yang diharapkan

Diketahui jumlah populasi yang diharapkan sebanyak 206 orang guru SD dan SMP di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, dengan tingkat presisi yang ditetapkan sebesar = 5%, dengan memasukkan nilai tersebut diperoleh :

$$n = \frac{206}{206(0,05)^2 + 1} = 135,97, \text{ diambil } 136 \text{ orang}$$

Sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 136 orang responden, guru SD dan SMP di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, dengan proporsi sebagai berikut:

Guru SD : 90/206 (136) = 59 responden

Guru SMP : 116/206 (136) = 77 responden

Total jumlah responden = 136 responden

#### **D. Variabel Penelitian**

Variabel penelitian terdiri variabel terikat dan variabel bebas. Kemampuan SDM aparat, anggaran dan sarana/prasarana adalah variabel bebas dalam penelitian ini yang berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan wajib belajar 9 tahun pada karakteristik kepulauan dan daratan utama di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar sebagai variabel terkait.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Data primer adalah data yang diperoleh melalui hasil penelitian langsung terhadap obyek yang diteliti. Data tersebut diperoleh melalui metode wawancara dan observasi dari responden.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber, antara lain dari dokumentasi/tulisan (buku-buku, laporan-laporan, karya ilmiah dan hasil penelitian) dan dari informasi pihak-pihak yang berkaitan dengan kajian yang diteliti (uraian tugas, struktur organisasi, tata kerja, referensi, dan lain-lain).

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh data yang relevan dan akurat dengan masalah yang dibahas.

Teknik pengumpulan data tersebut melalui :

##### **1. Observasi**

Metode ini digunakan sebagai salah satu piranti dengan melakukan pengumpulan data berdasarkan pengamatan secara langsung faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan wajib belajar 9 tahun pada karakteristik kepulauan dan daratan utama di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar.

## **2. Wawancara**

Wawancara adalah melakukan dialog secara langsung untuk memperoleh informasi dari responden terpilih dalam menghimpun informasi yang relevan dengan kajian.

## **3. Kuesioner**

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang mengajukan sejumlah pertanyaan secara tertulis yang diberikan kepada responden dengan maksud untuk memperoleh data yang akurat dan valid.

## **4. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah aktivitas untuk memperoleh sejumlah data melalui pencatatan-pencatatan dari dokumen-dokumen yang terdapat pada lokasi penelitian.

## **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Analisis secara deskriptif mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan wajib belajar 9 tahun pada karakteristik kepulauan dan daratan utama di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar.

2. Analisis Efektifitas , yaitu dilakukan dengan cara :

- a. Menghitung Angka Partisipasi Kasar (APK). APK adalah angka yang menunjukkan jumlah siswa suatu sekolah dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah dikali seratus persen.

$$\text{APK} = \frac{\text{Jumlah siswa suatu sekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia sekolah}} \times 100\%$$

Kriteria efektivitas yang digunakan sesuai dengan kriteria Depdiknas adalah sebagai berikut :

1. Jika APK = 85% - 89% disebut Tuntas Pratama
2. Jika APK = 90% - 94% disebut Tuntas Madya
3. Jika APK = 95% - 99% disebut Tuntas Utama
4. Jika APK = 100% disebut Tuntas Paripurna

- b. Menghitung Angka Partisipasi Murni (APM). APM adalah angka yang menunjukkan jumlah siswa usia sekolah dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah dikali seratus persen.

$$\text{APM} = \frac{\text{Jumlah siswa usia sekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia sekolah}} \times 100\%$$

Angka APM sudah dikatakan efektif jika sudah mencapai 85%.

- c. Menghitung Angka Putus Sekolah (APS). APS adalah jumlah siswa yang putus sekolah (tidak melanjutkan sekolah di kelas yang tinggi) dibandingkan dengan jumlah siswa usia sekolah dikali seratus persen.

$$\text{APS} = \frac{\text{Jumlah siswa putus sekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia sekolah}} \times 100\%$$

3. Metode analisis regresi linear berganda dengan rumus : (Sugiyono, 2003:44)

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e_i$$

Dimana :

Y = Efektifitas Kebijakan Program

X<sub>1</sub> = Kemampuan SDM

X<sub>2</sub> = Anggaran

X<sub>3</sub> = Peran serta masyarakat

b<sub>1</sub>- b<sub>3</sub> = Koefisien Regresi (Parameter)

b<sub>0</sub> = Konstanta (Intercept)

e<sub>i</sub> = Faktor Kesalahan

Selanjutnya untuk menentukan pengaruh dan tingkat signifikan dapat diuji dengan menggunakan uji t dan uji -F melalui program SPSS 16.0.

### H. Definisi Operasional

1. Y : Efektivitas program wajib belajar adalah suatu aktivitas dari pihak dinas yang menangani sektor pendidikan sesuai dengan realisasi aktivitas kerja yang dilakukan berdasarkan target yang telah ditetapkan. Untuk mengukur efektivitas program digunakan indikator (a) target program, (b) realisasi program. Pengukuran indikator menggunakan skala Likert dengan kategori sebagai berikut:

a. Y<sub>1</sub> : Target program, diukur dengan kategori:

- 1) Sangat baik, jika target ditetapkan sesuai dengan analisis potensi.



- 2) Baik, jika target ditetapkan berdasarkan perkiraan/pengalaman.
- 3) Kurang baik, jika target ditetapkan tanpa pedoman apapun.
- 4) Tidak baik, jika target tidak ditetapkan

b.  $Y_2$  : Realisasi program, diukur dengan kategori:

- 1) Sangat baik, jika realisasi mencapai 80% – 100% dari target
- 2) Baik, jika realisasi mencapai 61% – 80% dari target.
- 3) Kurang baik, jika realisasi mencapai 41% – 60% dari target.
- 4) Tidak baik, jika realisasi hanya mencapai = 40% dari target.

2.  $X_1$  : Kemampuan SDM aparat adalah kemampuan yang dimiliki setiap individu pengelola dalam mengefektifkan pelayanan pada masyarakat sesuai hasil kerja yang dicapai. Indikatornya adalah (a) tingkat pendidikan, (b) keterampilan, (c) pengalaman kerja dan (d) penguasaan teknologi.

Untuk mengukur kemampuan SDM aparat digunakan skala Likert dengan indikator sebagai berikut:

a.  $X_{1,1}$  : Tingkat pendidikan, diukur dengan kategori:

- 1) Sangat baik, jika tingkat pendidikan Pascasarjana
- 2) Baik, jika tingkat pendidikan Diploma III, IV atau Sarjana S1
- 3) Kurang baik, jika tingkat pendidikan Diploma I, II atau PGSD/PGSMP.
- 4) Tidak baik, jika tingkat pendidikan tertinggi SMA atau sederajat.

b.  $X_{1,2}$  : Keterampilan, diukur dengan kategori:

- 1) Sangat baik, jika menguasai tiga atau lebih keterampilan

- 2) Baik, jika menguasai dua keterampilan
  - 3) Kurang baik, jika menguasai satu keterampilan
  - 4) Tidak baik, jika tidak menguasai satupun keterampilan.
- c.  $X_{1.3}$  : Pengalaman kerja, diukur dengan kategori:
- 1) Sangat baik, jika pengalaman kerja 10 – 15 tahun atau lebih
  - 2) Baik, jika pengalaman kerja lebih 5 – 10 tahun
  - 3) Kurang baik, jika pengalaman kerja lebih 2 – 5 tahun
  - 4) Tidak baik, jika pengalaman kerja kurang dari 2 tahun.
- d.  $X_{1.4}$  : Penguasaan teknologi, diukur dengan kategori:
- 1) Sangat baik, jika menguasai teknologi media pengajaran, seperti komputer, internet, dan multimedia.
  - 2) Baik, jika tahu menggunakan teknologi media pengajaran
  - 3) Kurang baik, jika hanya tahu menggunakan komputer.
  - 4) Tidak baik, jika tidak tahu menggunakan teknologi media pengajaran.
3.  $X_2$  : Anggaran adalah pendanaan dan pembiayaan terhadap sektor pendapatan yang dapat dikelola secara optimal dalam efektivitas kebijakan wajib belajar 9 tahun pada karakteristik kepulauan dan daratan utama di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar. Indikatornya adalah (a) anggaran rutin, (b) swadaya dan (c) hasil penerimaan retribusi.
- Untuk mengukur Anggaran digunakan skala Likert dengan indikator sebagai berikut:
- a.  $X_{2.1}$  : Rutin, diukur dengan kategori:

- 1) Sangat baik, jika anggaran rutin sangat besar
  - 2) Baik, jika anggaran rutin besar
  - 3) Kurang baik, anggaran rutin sedang
  - 4) Tidak baik, jika anggaran rutin kecil.
- b.  $X_{2.2}$  : Swadaya, diukur dengan kategori:
- 1) Sangat baik, jika anggaran swadaya sangat besar
  - 2) Baik, jika anggaran swadaya besar
  - 3) Kurang baik, anggaran swadaya sedang
  - 4) Tidak baik, jika anggaran swadaya kecil.
- c.  $X_{2.3}$  : Hasil Retribusi, diukur dengan kategori:
- 1) Sangat baik, jika hasil retribusi sangat besar
  - 2) Baik, jika hasil retribusi besar
  - 3) Kurang baik hasil retribusi sedang
  - 4) Tidak baik, hasil retribusi kecil.
4.  $X_3$  : Peran serta masyarakat adalah keikutsertaan memberikan andil dan kontribusi terhadap pelayanan secara efektif. Indikatornya adalah (a) partisipasi secara (a) teknis (bantuan dana), (b) praktis (bantuan tenaga), dan (c) taktis (bantuan pikiran).
- Untuk mengukur partisipasi digunakan skala Likert dengan indikator sebagai berikut:
- a.  $X_{3.1}$  : Partisipasi teknis (bantuan dana), diukur dengan kategori:
- 1) Sangat baik, jika selalu aktif dalam memberikan bantuan dana.
  - 2) Baik, jika sering aktif dalam memberikan bantuan dana.

- 3) Kurang baik, kadang-kadang aktif dalam memberikan bantuan dana.
  - 4) Tidak baik, tidak pernah aktif dalam memberikan bantuan dana.
- b.  $X_{3,1}$  : Partisipasi praktis (bantuan tenaga), diukur dengan kategori:
- 1) Sangat baik, jika selalu aktif dalam memberikan bantuan tenaga.
  - 2) Baik, jika sering aktif dalam memberikan bantuan tenaga.
  - 3) Kurang baik, kadang-kadang aktif dalam memberikan bantuan tenaga.
  - 4) Tidak baik, tidak pernah aktif dalam memberikan bantuan dana.
- c.  $X_{3,1}$  : Partisipasi taktis (bantuan pikiran), diukur dengan kategori:
- 1) Sangat baik, jika selalu aktif dalam memberikan bantuan pikiran.
  - 2) Baik, jika sering aktif dalam memberikan bantuan pikiran.
  - 3) Kurang baik, kadang-kadang aktif dalam memberikan bantuan pikiran.
  - 4) Tidak baik, tidak pernah aktif dalam memberikan bantuan pikiran .

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kota Makassar terletak pada posisi  $119^{\circ} 18' 27,97''$  –  $190^{\circ} 32' 31,03''$  BT dan  $05^{\circ} 30' 30''$ –  $05^{\circ} 14' 49''$  LS. Luas wilayah Kota Makassar adalah 17.577 ha, yang terdiri dari daratan utama seluas 17.437 ha, daratan pulau-pulau kecil 140 ha dan luas perairan laut 10.000 ha. Kota Makassar memiliki 12 buah pulau dan 1 gusung. Jumlah penduduk Kota Makassar sebesar 1.179.023 jiwa Ini dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 1,64% per tahun.

Kecamatan Ujung Tanah adalah salah satu dari 14 Kecamatan yang ada di Kota Makassar yang berpenduduk 45.491, gambaran umum kondisi pendidikan di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar dari segi jumlah sekolah, di tingkat pendidikan dasar, jumlah Sekolah Dasar yang tersediaberdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) seperti jumlah Sekolah Dasar sebanyak 28 buah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebanyak 8 buah, dan sedangkan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) terdiri dari Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sejumlah 3 buah.

Berdasarkan hasil angka sementara Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2006 BPS tercatat bahwa dari penduduk berumur 7 -12 tahun sebanyak 6.946 yang menamatkan pendidikannya sekitar 19,71 persen

tidak pernah sekolah, 16.89 persen yang masih sekolah, dan 63.40 persen sudah tidak bersekolah lagi. Bila dilihat dari pendidikan yang ditamatkan, ternyata hampir 42.00 persen tidak/belum tamat SD. Penduduk yang menamatkan SD, SLTP, dan SLTA mencapai 54.41 persen sedangkan Diploma I ke atas hanya ditamatkan oleh kurang dari 5.00 persen dari total penduduk usia 10 tahun ke atas yang sekolah.

Pada saat ini pendidikan di Kecamatan Ujung Tanah masih dihadapkan pada permasalahan yaitu masih rendahnya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan masyarakat yang secara makro tentu saja akan mempengaruhi keberhasilan pembangunan manusia

Dalam kerangka pembangunan jangka menengah Kota Makassar dibutuhkan analisis indikator ekonomi dan pembiayaan pembangunan pada berbagai sektor dalam kurun waktu lima tahun untuk menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan di bidang ekonomi, guna mencapai tujuan kesinambungan pembangunan jangka panjang Kota Makassar.

Pembangunan ekonomi selain telah menghasilkan berbagai kemajuan yang berarti, juga mewariskan berbagai permasalahan akibat penitikberatan pembangunan hanya kepada tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pada masa lalu pembangunan ekonomi sangat berorientasi kepada peningkatan produksi tanpa disertai oleh pembangunan dan perkuatan insitusi-insitusi baik publik, sehingga berbagai insitusi strategis tidak berkembang sebagaimana yang diharapkan, seperti sistem hukum dan

peradilan yang dapat menjamin kepastian hukum dan keadilan, sistem politik yang dapat menciptakan mekanisme kontrol dan keseimbangan, dan sistem sosial yang dapat memelihara kehidupan yang harmonis dan damai.

Pembangunan pendidikan belum sepenuhnya mampu memenuhi hak-hak dasar warga negara. Pada tahun 2004 rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas baru mencapai 9,9 tahun pada tahun 1999 menjadi 10,3 tahun pada tahun 2002.

Kualitas pendidikan juga masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kurang meratanya kualitas pendidik, serta kesejahteraan pendidik yang masih rendah. Disamping itu, fasilitas belajar juga belum tersedia secara memadai sehingga mungkin saja masih ada peserta didik yang tidak memiliki buku pelajaran. Beberapa permasalahan pendidikan yang ada di Kota Makassar saat ini (RJMD Kota Makassar) :

- 1). Anggaran pembangunan pendidikan belum tersedia secara memadai jika dibandingkan dengan kebutuhan;
- 2). Kualitas pendidikan relatif masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik;
- 3). Pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dapat meningkatkan kemampuan kewirausahaan lulusan;

- 4). Dinamika perubahan struktur penduduk belum sepenuhnya teratasi dalam pembangunan pendidikan, dimana jumlah anak sekolah SD berkurang sebagai dampak dari keberhasilan KB;
- 5). Masih terdapat kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup besar antar kelompok masyarakat, seperti antara penduduk kaya dan miskin, antara penduduk laki-laki dan perempuan.

Sasaran pembangunan pendidikan yang ingin dicapai adalah :

- 1). Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan, dengan indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SD 100 %, SMP 98,09 %, SMA 69,34 % dan PT 18%; Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 tahun 99,57%, 13-15 tahun 96,64%; dan angka melanjutkan sekolah dari SD ke SMP 94% dan dari SMP ke SMA 90%;
- 2). Meningkatnya mutu pendidikan secara berjenjang sesuai tuntutan pasar.

#### **Prioritas Arah Kebijakan.**

- 1). Mengoptimalkan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dengan menaikkan APK 77,0% menjadi 90,50% APM dari 51,83% menjadi 75,00%;
- 2). Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan;
- 3). Meningkatkan mutu tenaga pendidik dan anak didik;



- 4). Meningkatkan perluasan pendidikan anak usia dini dalam rangka membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi anak;
- 5). Menyelenggarakan pendidikan non formal yang bermutu;
- 6). Menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat;
- 7). Mengintensifkan pelaksanaan sosialisasi pentingnya pendidikan;
- 8). Mengembangkan kurikulum muatan lokal;
- 9). Meningkatkan jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan lainnya;
- 10). Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan.
- 11). Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.

## **B. Deskripsi Umum Responden**

Subyek penelitian ini memiliki karakteristik umum yakni kepala sekolah dan guru SD dan SMP di Kecamatan Ujung Tanah pada saat penelitian ini dilakukan masih berstatus sebagai pegawai yang melaksanakan tugas. Namun dari karakteristik umum yang dimiliki responden, terdapat pula karakteristik khusus yang secara terinci berbeda dari setiap responden. Karakteristik yang dimaksud akan dipaparkan pada bagian ini meliputi : usia, tingkat pendidikan, masa kerja terakhir responden.

### 1. Usia responden

Usia adalah merupakan variabel yang sangat menentukan tingkat produktivitas pengelola pendidikan, dengan tingkat usia yang masih produktif akan berpengaruh terhadap kinerjanya yang tentunya akan memberikan dampak terhadap kualitas proses belajar mengajar yang diberikan.

Tabel 1. Distribusi responden menurut usia

No	Rentang Usia (Tahun)	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	< 41 Tahun	60	44,12
2.	41 – 50 Tahun	47	34,56
3.	> 51 Tahun	29	21,32
	Jumlah	136	100

Sumber : Olahan kuisoner, 2008

Pada tabel diatas menunjukkan rentang usia responden di bawah 41 tahun sebesar 60 orang atau 44,12 persen, rentang usia 41 – 50 tahun sebesar 47 orang atau 34,56 persen dan rentang usia di atas 51 tahun sebesar 29 orang atau 21,32 persen. Kondisi ini menunjukkan rentang usia seorang responden di lokasi penelitian yang paling berpotensi memiliki kinerja terbaik pada semua kelompok usia sedangkan faktor seperti pengalaman, proses pembelajaran, kematangan berpikir serta kondisi fisik dan energi yang masih memadai adalah penunjang.

### 3. Masa kerja responden

Masa kerja adalah lamanya seorang pegawai menjalankan profesi sebagai seorang pegawai, dengan masa kerja yang relatif lama diharapkan

mempunyai pengalaman, profesionalisme serta produktivitas yang lebih baik.

Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Distribusi responden menurut masa kerja

No	Masa Kerja	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	(1 - 10 ) Tahun	60	44,12
2.	(11 – 20) Tahun	47	34,56
3.	(21 – 30) Tahun	29	21,32
	Jumlah	136	100

Sumber : Olahan kuesioner, 2008

Berdasarkan data yang dihimpun dari responden menunjukkan masa kerja 1 – 10 tahun sebesar 60 orang atau 44,12 persen, masa kerja 11 – 20 tahun sebesar 47 orang atau 34,56 persen, rentang usia 21-30 tahun sebesar 29 orang atau 21,32 persen, kondisi ini memperlihatkan masa kerja yang tinggi akan sangat menunjang terciptanya kinerja yang tinggi bagi seorang pengelola pendidikan untuk dapat menjalankan dan mengembangkan kinerjanya.

#### **4. Tingkat pendidikan responden**

Jika dirinci jenjang pendidikan terakhir responden maka dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Distribusi responden menurut tingkat pendidikan

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Diploma	85	62,50
2.	S1	48	35,29
3.	S2	3	2,21
	Jumlah	136	100

Sumber : Olahan kuisoner, 2008

Berdasarkan data yang dihimpun dari responden menunjukkan tingkat pendidikan Diploma sebesar 85 orang atau 62,50 persen, tingkat pendidikan S1 sebesar 48 orang atau 35,29 persen, tingkat pendidikan S2 sebanyak 3 orang atau 2,21 persen. Kondisi ini mengindikasikan kontribusi tingkat pendidikan sangat menunjang terciptanya kinerja yang tinggi bagi seorang tenaga pendidik untuk dapat menjalankan dan mengembangkan kinerjanya.

### C. Deskripsi Variabel Penelitian

#### 1. Efektivitas Program Wajib Belajar

Program wajib belajar sembilan tahun adalah salah satu bentuk kepedulian pemerintah yang tinggi terhadap masalah pendidikan. Oleh sebab itu agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam target dan realisasinya pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun perlu diawasi oleh pihak luar. Disamping itu juga perlu dilakukan secara internal melalui akuntabilitas baik pengawasan internal maupun eksternal keduanya

bertujuan untuk mendapatkan transparansi dan hasil yang maksimal. Variabel ini dikembangkan menjadi 2 indikator strategis yaitu target program dan realisasi daripada program yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan penilaian responden dalam kuisioner penelitian ini efektivitas program wajib belajar 9 tahun pada indikator target program disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Distribusi jawaban responden efektivitas program wajib belajar 9 tahun aspek target program

NO	Kategori	Frekuensi (f)	Presentase (%)
1.	Tidak Baik	27	19,85
2.	Kurang Baik	28	20,59
3.	Baik	41	30,15
4.	Sangat Baik	40	29,41
Jumlah		136	100

Sumber : Data diolah tahun 2008

Berdasarkan penilaian responden efektivitas program wajib belajar 9 tahun aspek target program tertinggi pada kategori baik sebanyak 41 orang atau 30,15 persen, kategori sangat baik sebanyak 40 orang atau 29,41 persen, kategori kurang baik sebanyak 28 orang atau 20,59 persen sisanya pada kategori tidak baik sebanyak 27 responden atau 19,85 persen, mengindikasikan apresiasi yang sangat positif terhadap target pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di lokasi penelitian. Penilaian responden terhadap realisasi program wajib belajar 9 tahun disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5. Distribusi jawaban responden efektivitas program wajib relajar 9 tahun aspek realisasi program

NO	Kategori	Frekuensi (f)	Presentase (%)
1.	Tidak Baik	27	19,85
2.	Kurang Baik	38	27,94
3.	Baik	37	27,21
4.	Sangat Baik	34	25,00
Jumlah		136	100

Sumber : Data diolah tahun 2008

Berdasarkan penilaian responden efektivitas program wajib relajar 9 tahun aspek tujuan program tertinggi pada kategori kurang baik sebanyak 38 orang atau 27,94 persen, kategori baik sebanyak 37 orang atau 27,21 persen, kategori Sangat baik sebanyak 34 orang atau 25,00 persen sisanya pada kategori tidak baik sebanyak 27 responden atau 19,85 persen,

## 2. Kemampuan SDM

Perkembangan baru terhadap pandangan pelaksanaan belajar mengajar membawa konsekuensi kepada segenap pengelola pendidikan untuk meningkatkan peranan dan kompetensinya, karena proses belajar mengajar dan hasil-hasil belajar siswa sebagian besar ditentukan oleh peran dan kompetensi pengelola pendidikan. pengelola pendidikan yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan akan lebih mampu mengelola kelasnya, sehingga hasil belajar siswa berada pada tingkat optimal. Kemampuan SDM merupakan kemampuan yang dimiliki setiap individu pengelola dalam mengefektifkan pelayanan pada masyarakat

sesuai hasil kerja yang dicapai. Distribusi jawaban responden pada Indikatornya tingkat pendidikan disajikan sebagai berikut :

Tabel 6. Distribusi jawaban responden kemampuan SDM wajib belajar 9 tahun aspek tingkat pendidikan

NO	Kategori	Frekuensi (f)	Presentase (%)
1.	Tidak Baik	30	22,06
2.	Kurang Baik	32	23,53
3.	Baik	39	28,68
4.	Sangat Baik	35	25,74
Jumlah		136	100

Sumber : Data diolah tahun 2008

Berdasarkan penilaian responden kemampuan SDM program wajib belajar 9 tahun aspek tingkat pendidikan program tertinggi pada kategori baik sebanyak 39 orang atau 28,68 persen, kategori Sangat baik sebanyak 35 orang atau 25,74 persen, kategori kurang baik sebanyak 32 orang atau 23,53 persen sisanya pada kategori tidak baik sebanyak 30 responden atau 22,06 persen,

Distribusi jawaban responden yang terkonsentrasi pada kategori baik menunjukkan apresiasi yang positif terhadap tingkat pendidikan pengelola pendidikan saat ini dimana terlihat minat dan motivasi untuk memperbaiki tingkat pendidikan yang dimilikinya terus meningkat. Distribusi jawaban responden variabel kemampuan SDM aspek ketrampilan disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 7. Distribusi jawaban responden kemampuan SDM wajib belajar 9 tahun aspek Ketrampilan

NO	Kategori	Frekuensi (f)	Presentase (%)
1.	Tidak Baik	31	22,79
2.	Kurang Baik	37	27,21
3.	Baik	32	23,53
4.	Sangat Baik	36	26,47
Jumlah		136	100

Sumber : Data diolah tahun 2008

Penilaian responden kemampuan SDM program wajib belajar 9 tahun aspek ketrampilan tertinggi pada kategori kurang baik sebanyak 37 orang atau 27,21 persen, kategori sangat baik sebanyak 36 orang atau 26,47 persen, kategori baik sebanyak 32 orang atau 23,53 persen sisanya pada kategori tidak baik sebanyak 31 responden atau 22,79 persen, adanya komposisi jawaban responden yang terkonsentrasi pada kategori kurang baik mengindikasikan perlunya pembenahan aspek ketrampilan pengelola pendidikan mendukung program wajib belajar 9 tahun melalui program pendidikan dan pelatihan.

Distribusi jawaban responden variabel kemampuan SDM aspek pengalaman kerja disajikan dalam tabel sebagai berikut :



Tabel 8. Distribusi jawaban responden kemampuan SDM wajib belajar 9 tahun aspek pengalaman

NO	Kategori	Frekuensi (f)	Presentase (%)
1.	Tidak Baik	29	21,32
2.	Kurang Baik	32	23,53
3.	Baik	44	32,35
4.	Sangat Baik	31	22,79
Jumlah		136	100

Sumber : Data diolah tahun 2008

Jawaban responden kemampuan SDM program wajib belajar 9 tahun aspek pengalaman tertinggi pada kategori baik sebanyak 44 orang atau 32,35 persen, kategori kurang baik sebanyak 32 orang atau 23,53 persen, kategori Sangat baik sebanyak 31 orang atau 22,79 persen sisanya pada kategori tidak baik sebanyak 29 responden atau 21,32 persen, komposisi jawaban responden yang terkonsentrasi pada kategori baik mengindikasikan modal pengalaman yang dimiliki SDM mendukung program wajib belajar 9 tahun sudah memadai.

Variabel kemampuan SDM aspek penguasaan teknologi disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 9. Distribusi jawaban responden kemampuan SDM wajib belajar 9 tahun aspek penguasaan teknologi

NO	Kategori	Frekuensi (f)	Presentase (%)
1.	Tidak Baik	33	24,26
2.	Kurang Baik	36	26,47
3.	Baik	34	25,00
4.	Sangat Baik	33	24,26
Jumlah		136	100

Sumber : Data diolah tahun 2008

Jawaban responden kemampuan SDM program wajib belajar 9 tahun aspek penguasaan teknologi tertinggi pada kategori kurang baik sebanyak 36 orang atau 26,47 persen, kategori baik sebanyak 34 orang atau 25,00 persen sisanya pada kategori sangat baik dan tidak baik sebanyak 33 responden atau 24,26 persen. Dalam dunia pendidikan sudah saatnya kita memanfaatkan teknologi yang akan memberikan nilai tambah dalam proses pembelajaran. Hal ini berkaitan dengan semakin tingginya kebutuhan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak semuanya diperoleh dalam lingkungan sekolah. Dalam pemanfaatan teknologi diharapkan tingkat daya pikir serta kreativitas guru dan siswa serta masyarakat dapat berkembang dengan pesat.

### 3. Anggaran

Pembiayaan program wajib belajar 9 tahun memainkan peranan yang penting dalam suatu kegiatan atau penyelenggaraan pendidikan, manfaat dan fungsi anggaran adalah untuk memperlancar proses terlaksananya suatu kegiatan dan menjadi tanggung jawab berbagai komponen termasuk diantaranya Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat.

Distribusi penilaian responden variabel anggaran aspek anggaran rutin disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 10 Distribusi jawaban responden Anggaran wajib belajar 9 tahun aspek anggaran rutin

NO	Kategori	Frekuensi (f)	Presentase (%)
1.	Tidak Baik	33	24,26
2.	Kurang Baik	34	25,00
3.	Baik	40	29,41
4.	Sangat Baik	26	19,12
Jumlah		136	100

Sumber : Data diolah tahun 2008

Jawaban responden menilai anggaran rutin program wajib belajar 9 tahun tertinggi pada kategori baik sebanyak 40 orang atau 29,41 persen, kategori kurang baik sebanyak 34 orang atau 25,00 persen, kategori tidak baik sebanyak 33 responden atau 24,26 persen dan kategori sangat baik sebanyak 26 orang atau 19,12 pesen. Distribusi penilaian responden variabel anggaran aspek anggaran swadaya disajikan dalam tabel sebagai berikut

Tabel 11 Distribusi jawaban responden Anggaran wajib belajar 9 tahun aspek Swadaya

NO	Kategori	Frekuensi (f)	Presentase (%)
1.	Tidak Baik	28	20,59
2.	Kurang Baik	39	28,68
3.	Baik	31	22,79
4.	Sangat Baik	35	25,74
Jumlah		136	100

Sumber : Data diolah tahun 2008

Apresiasi responden menilai anggaran swadaya program wajib belajar 9 tahun di lokasi penelitian tertinggi pada kategori kurang baik sebanyak 39 orang atau 28,68 persen, kategori sangat baik sebanyak 35 orang atau 25,74 persen, kategori baik sebanyak 31 responden atau 22,79 persen dan kategori tidak baik sebanyak 28 orang atau 20,59 pesen.

Distribusi penilaian responden variabel anggaran aspek hasil retribusi disajikan dalam tabel sebagai berikut

Tabel 12 Distribusi jawaban responden Anggaran wajib belajar 9 tahun aspek hasil retribusi

NO	Kategori	Frekuensi (f)	Presentase (%)
1.	Tidak Baik	38	27,94
2.	Kurang Baik	24	17,65
3.	Baik	40	29,41
4.	Sangat Baik	31	22,79
Jumlah		136	100

Sumber : Data diolah tahun 2008

Aspek anggaran hasil retribusi program wajib belajar 9 tahun di lokasi penelitian dinilai oleh responden berada pada kategori baik sebanyak 40

orang atau 29,41 persen, kategori tidak baik sebanyak 38 orang atau 27,94 persen, kategori sangat baik sebanyak 31 responden atau 22,79 persen dan kategori kurang baik sebanyak 24 orang atau 17,65 persen.

#### 4. Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat dalam Program wajib belajar 9 tahun adalah kerjasama yang erat antara Pemerintah dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil yang telah dicapai, termasuk di dalamnya kegiatan seseorang atau kelompok masyarakat untuk mendukung berhasilnya program sesuai dengan kemampuannya.

Dukungan masyarakat dapat berupa dukungan pemikiran, sumbangan tenaga, dana, material dalam tahapan pembangunan, dengan berpartisipasi dalam kegiatan wajib belajar 9 tahun diharapkan masyarakat memperoleh manfaat langsung dari program wajib belajar 9 tahun.

Tabel 13. Distribusi jawaban responden Peran serta Masyarakat dalam wajib belajar 9 tahun aspek partisipasi teknis

NO	Kategori	Frekuensi (f)	Presentase (%)
1.	Tidak Baik	29	21,32
2.	Kurang Baik	29	21,32
3.	Baik	44	32,35
4.	Sangat Baik	34	25,00
Jumlah		136	100

Sumber : Data diolah tahun 2008

Aspek peran serta masyarakat dalam bentuk partisipasi teknis program wajib belajar 9 tahun di lokasi penelitian dinilai oleh responden

berada pada kategori baik sebanyak 44 orang atau 32,35 persen, kategori sangat baik sebanyak 34 orang atau 25,00 persen, kategori tidak baik dan kurang baik keduanya sebanyak 29 orang atau 21,32 pesen.

Tabel 14. Distribusi jawaban responden Peran serta Masyarakat dalam wajib belajar 9 tahun aspek partisipasi praktis

NO	Kategori	Frekuensi (f)	Presentase (%)
1.	Tidak Baik	31	22,79
2.	Kurang Baik	27	19,85
3.	Baik	41	30,15
4.	Sangat Baik	37	27,21
Jumlah		136	100

Sumber : Data diolah tahun 2008

Penilaian responden pada aspek partisipasi praktis menunjukkan bahwa animo partisipasi masyarakat dalam kegiatan wajib belajar 9 tahun berada pada kategori baik sebanyak 41 orang atau 30,15 persen, kategori sangat baik 37 orang atau 27,21 persen, kategori tidak baik sebanyak 31 orang atau 22,79 persen sisanya pada kategori kurang baik sebanyak 27 orang atau 19,85 persen.

Partisipasi masyarakat di dalam pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di kecamatan Tallo tidak hanya berupa sumbangan sumber daya yang bersifat nyata dan terukur seperti uang, tanah, dan tenaga, tetapi lebih daripada itu ada sumber daya lain yang disumbangkan masyarakat tetapi sulit untuk diukur yaitu partisipasi taktis seperti pengetahuan mengenai sumber daya, kebutuhan, dan prioritas, kreativitas, ketrampilan dan organisasi disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 15. Distribusi jawaban responden Peran serta Masyarakat dalam wajib belajar 9 tahun aspek partisipasi taktis

NO	Kategori	Frekuensi (f)	Presentase (%)
1.	Tidak Baik	37	27,21
2.	Kurang Baik	38	27,94
3.	Baik	31	22,79
4.	Sangat Baik	30	22,06
Jumlah		136	100

Sumber : Data diolah tahun 2008

Penilaian responden pada aspek partisipasi taktis dalam kegiatan wajib belajar 9 tahun berada pada kategori kurang baik sebanyak 38 orang atau 27,94 persen, kategori tidak baik 37 orang atau 27,21 persen, kategori baik sebanyak 31 orang atau 22,79 persen sisanya pada kategori Sangat baik sebanyak 30 orang atau 22,06 persen.

#### **D. Pengaruh Kemampuan SDM Aparat, Anggaran, dan Peran Serta Masyarakat terhadap Efektivitas Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun**

Penelitian ini ingin melihat pengaruh secara simultan (atau bersama-sama) antara variabel independen kemampuan SDM aparat, anggaran, dan peran serta masyarakat terhadap efektivitas kebijakan wajib belajar 9 tahun, serta pengaruh secara sendiri-sendiri antara kemampuan SDM aparat ( $X_1$ ) dan efektivitas kebijakan wajib belajar 9 tahun, pengaruh secara sendiri-sendiri anggaran ( $X_2$ ) dan efektivitas kebijakan wajib belajar 9 tahun, pengaruh secara sendiri-sendiri peran serta masyarakat ( $X_4$ ) dan efektivitas kebijakan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Ujung Tanah Kota Macasar

menggunakan analisis regresi berganda untuk memprediksi besar hubungan variabel tergantung (dependen) dengan menggunakan variabel bebas (independen) yang sudah diketahui besarnya.

Besarnya nilai koefisien korelasi sebesar 0,931 dikategorikan hubungan yang memiliki tingkat asosiasi yang kuat, karena berada diatas nilai tengah 0,5 dan berada sangat dekat dengan bilangan 1. Arah hubungan yang positif menunjukkan adanya asosiasi yang berbanding lurus artinya peningkatan efektivitas wajib belajar 9 tahun diikuti oleh peningkatan kemampuan SDM aparat, anggaran, dan peran serta masyarakat besar hubungan kuat sangat baik untuk diproses lebih lanjut dengan analisis regresi.

Koefisien determinasi diperoleh dengan mengkuadratkan koefisien korelasi ( $R^2$ ) menggambarkan seberapa besar kontribusi semua variabel independen terhadap variabel bebas. Karena merupakan kuadrat dari koefisien korelasi maka besaran ini selalu positif dan bernilai antara minimal 0 dan maksimal 1. Dari hasil perhitungan diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,867 dalam hal ini digunakan Adjusted R Square karena variabel independen lebih dari dua sebesar 0,864 jika dikonfersi kedalam persentase diperoleh angka 86,40 persen artinya sebesar 86,40 persen secara bersama-sama variabel independen dapat menjelaskan variasi dari variabel dependen. Besaran 86,40 persen adalah dapat dikatakan memiliki nilai yang cukup berarti karena sudah berada diatas 50 persen dan faktor lain yang



dapat menjelaskan variasi naik turunnya variabel dependen sebesar 13,60 persen selain kemampuan SDM aparat, anggaran, dan peran serta peran serta masyarakat.

Hasil perhitungan analisis variansi/uji F diperoleh nilai F Hitung sebesar 286,438 dengan nilai signifikansi sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05 berarti semakin jelas bahwa efektivitas wajib belajar 9 tahun dapat diprediksi melalui variabel independen kemampuan SDM aparat, anggaran, dan peran serta peran serta masyarakat.

Tabel 16. Analisis variansi perhitungan analisis regresi

Sumber Variasi	Jumlah Kuadrat	Derajat Bebas	Kuadrat Tengah	F Hitung	P-Value
Regresi	347.145	3	115.715	286,438	0,00
Sisa	53.325	132	0,404		
Total	400.471	135			

Sumber : Olahan kuesoner, 2008

Persamaan regresi  $\hat{Y} = 1,447 + 0,443 X_1 + 0,307 X_2 + 0,145 X_3 + ?$  yang diperoleh dari hasil perhitungan, nilai-nilai yang ada dalam persamaan dapat diterjemahkan dan menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini, tahapan selanjutnya adalah menguji keberartian masing-masing koefisien regresi secara parsial dengan menggunakan uji T menggunakan hipotesis sebagai berikut :

$H_0$  : Koefisien regresi tidak berpengaruh secara signifikan

$H_1$  : Koefisien regresi berpengaruh secara signifikan

Dengan mengkonsultasikan t hitung dan t tabel, Hipotesis nol ( $H_0$ ) dinyatakan ditolak atau hipotesis alternatif satu ( $H_1$ ) dinyatakan diterima jika T Hitung lebih besar dari T tabel pada tingkat kesalahan  $\alpha = 0,05$  dengan derajat bebas 135 (banyaknya observasi -1), Tabel koefisien regresi dan uji T hasil perhitungan SPSS disajikan sebagai berikut :

Tabel 17. Koefisien regresi dan uji T koefisien regresi

Variabel	t Hitung	t tabel	P-Value
$X_1$	9,45	9,45	0,000
$X_2$	12,62	12,62	0,000
$X_3$	6,30	6,30	0,006

Sumber : Olahan kuesioner, 2008

Koefisien regresi mempunyai nilai T hitung setelah dibandingkan dengan T tabel ( $0,05 ; 135$ ) diperoleh nilai 1,977 ternyata T hitung lebih besar dari T tabel pada  $X_1$ ,  $X_2$  dan  $X_3$  artinya  $H_0$  ditolak berarti koefisien regresi untuk konstanta dan koefisien regresi variabel kemampuan SDM aparat, anggaran, dan peran serta peran serta masyarakat secara berarti untuk menggambarkan efektivitas program wajib belajar 9 tahun di Kota Makassar.

Dari hasil uji T terlihat pengaruh ketiga variabel independen dan konstanta terhadap variabel dependen secara signifikan, namun besarnya sangat tergantung pada nilai koefisien regresinya masing-masing yang mempunyai pengaruh yang paling besar adalah sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 1,447 + 0,443 X_1 + 0,307 X_2 + 0,145 X_3 + ?$$

1. Variabel kemampuan SDM aparat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan efektivitas program wajib belajar 9 tahun kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar sebesar 0,443 satuan, variabel ini mempunyai nilai signifikansi 0,00 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan kontribusi tertinggi yang signifikan terhadap peningkatan efektivitas program wajib belajar 9 tahun
2. Variabel anggaran memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan efektivitas program wajib belajar 9 tahun kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar sebesar 0,307 satuan, variabel ini mempunyai nilai signifikansi 0,00 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan kontribusi terbesar kedua yang signifikan terhadap peningkatan efektivitas program wajib belajar 9 tahun.
3. Variabel peran serta masyarakat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan efektivitas program wajib belajar 9 tahun kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar sebesar 0,145 satuan, variabel ini mempunyai nilai signifikansi 0,00 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan kontribusi terkecil yang signifikan terhadap peningkatan efektivitas program wajib belajar 9 tahun.

## **E. Pembahasan Hasil Penelitian**

### **1. Efektivitas Program Wajib Belajar 9 Tahun**

Terwujudnya efektivitas Wajib Belajar 9 Tahun ini merupakan bagian dari tujuan utama dari reformasi sektor publik (reformasi administrasi publik).

Namun demikian mewujudkan efektivitas ini sangat sulit karena begitu kompleksnya permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan penilaian responden efektivitas program wajib belajar 9 tahun aspek target berada pada kategori baik sebanyak 41 orang atau 30,15 persenserta aspek tujuan program berada pada kategori kurang baik sebanyak 38 orang atau 27,94 persen

Tuntutan-tuntutan efektivitas dalam pelaksanaan wajib belajar 9 tahun mengharuskan Dinas Pendidikan untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horisontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal. Terkait dengan mekanisme administratif pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun di Kota Makassar agar dapat memenuhi kriteria diatas maka Dinas Pendidikan selaku pihak yang bertanggung jawab atas sukses tidaknya program tersebut telah melakukan berbagai hal sebagai salah satu bentuk kepedulian pemerintah yang tinggi terhadap masalah pendidikan.

Oleh sebab itu agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam realisasinya pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun perlu diawasi oleh pihak luar. Disamping itu juga perlu dilakukan secara internal melalui akuntabilitas. Baik pengawasan internal maupun eksternal keduanya bertujuan untuk mendapatkan transparansi dan hasil yang maksimal.

Efektivitas bagi instansi pemerintah yang melaksanakan program-programnya untuk kepentingan masyarakat merupakan satu kewajiban yang tidak dapat dihindari. Hal ini mengingat masyarakat sebagai pihak yang

menjadi sasaran program tersebut agar tidak dirugikan oleh tindakan-tindakan pemerintah yang menyimpang. Efektivitas juga diartikan sebagai pertanggungjawaban pemerintah yang lebih ditekankan pada respon pemerintah atas protes/ keluhan masyarakat atas penyimpangan yang direncanakan atau dilaksanakan.

Efektivitas dapat digunakan untuk mengukur sejauhmana keberhasilan dan pencapaian pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun. *Kedua*, akuntabilitas dapat digunakan untuk mengetahui adanya permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun dan upaya-upaya apa yang seharusnya dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi tersebut.

Hasil Efektivitas pelaksanaan ini dapat digunakan sebagai bahan laporan yang akan disampaikan baik kepada masyarakat maupun instansi yang lebih tinggi sehingga baik masyarakat maupun instansi yang lebih tinggi tersebut dapat memberikan penilaian atas keberhasilan maupun kegagalan dinas pendidikan dalam melaksanakan program wajib belajar sembilan tahun yang menjadi kewajibannya

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota LSM mengatakan pada prinsipnya masyarakat membutuhkan adanya transparansi dan keterbukaan, baik dalam pelaksanaan, dana, pencapaian serta kendala-kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar terlihat bahwa instansi

(sekolah-sekolah) tidak melaksanakan akuntabilitas administrasinya. Hal ini terlihat misalnya tidak ada pertanggung jawaban yang jelas kemana seharusnya laporan pemberian beasiswa diberikan. Sekolah-sekolah tidak merasa perlu memberikan laporan kepada instansi di atasnya yakni Dinas Pendidikan Kota Makassar. Mereka justru hampir semua membuat kebijakan sendiri terkait dengan penyaluran dana beasiswa yang tidak sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Dinas Pendidikan.

Penyimpangan ini bahkan seakan direstui oleh Dinas Pendidikan yang menyatakan bahwa kalau ternyata karena berbagai sebab harus dibagikan secara merata maka hal tersebut tersebut boleh-boleh saja. Hanya saja para orang tua hendaknya diberitahu dan kalau perlu dibuatkan perjanjian hitam diatas putih (ditulis). Hal ini perlu guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti suara-suara orang tua yang tidak mengenakan ataupun tuduhan-tuduhan kepada para kepala sekolah itu sendiri, di samping itu juga untuk pertanggung jawaban secara administratif. Artinya perlu ada laporan yang riil dari dana yang diterimakan kepada siswa meskipun hal tersebut tidak sesuai dengan aturannya. Tetapi yang justru dilakukan oleh beberapa sekolah adalah membuat dua laporan (laporan ganda). Yang pertama adalah laporan riil tentang jumlah dana yang diterimakan kepada siswa. Yang kedua adalah laporan yang dibuat sesuai dengan pedoman pemberian beasiswa yang seolah-olah itulah yang diterima oleh siswa.

Hal ini jika kita mau melihat realitas yang dihadapi oleh para kepala sekolah tersebut. Rata-rata kepala sekolah yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah mengabdikan pada suatu lembaga pendidikan yang hidup ditengah-tengah masyarakat yang kurang mampu. Bahkan salah satu sekolah yang dijadikan sampel dalam penelitian ini orang tua siswa yang paling mampu saja hanya seorang sopir "pete-pete" (sopir angkutan umum).

Oleh sebab itu rekomendasi yang disampaikan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mengubah kebijakan yang tidak sesuai dengan realitas untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berlaku dalam masyarakat. Atau kebijakan yang dikeluarkan tidak harus seragam antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Sebab mungkin saja kebijakan yang ada tersebut cocok untuk daerah yang satu namun justru kontraproduktif (menimbulkan perdebatan) bagi daerah yang lain.

Dinas Pendidikan sebagai pihak yang bertanggung jawab harus aktif memantau pelaksanaan wajib belajar di sekolah-sekolah. Dinas Pendidikan tidak boleh hanya menunggu laporan yang belum pasti yang dibuat oleh sekolah-sekolah. Bila perlu melakukan observasi hingga kepada orang tua siswa untuk melakukan *cross check* tentang kebenaran laporan yang disampaikan oleh sekolah.

Dengan membiarkan sekolah-sekolah untuk tidak melakukan pertanggungjawaban atas tindakan yang mereka lakukan maka Dinas Pendidikan turut memberikan andil jika terjadi berbagai penyimpangan di

lapangan. Kesimpulan yang dapat diambil dari paparan di atas adalah setiap instansi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat harus dapat memberikan pertanggung jawabannya. Hal ini penting untuk memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa pemerintah memang telah berupaya semaksimal mungkin memberikan yang terbaik untuk masyarakat.

Dengan demikian maka masyarakat akan merasa puas dan pada akhirnya akan memberikan dukungan pada setiap kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kurikulum yang disediakan oleh daerah disediakan sesuai dengan program wajib belajar sembilan tahun adalah kurikulum muatan lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan serta potensi yang ada di sekitar lingkungan sekolah.

Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar telah dilaksanakan melalui upaya pemerataan dan perluasan pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Hasil yang dicapai berupa peningkatan angka partisipasi dan angka transisi serta menurunnya angka putus sekolah.

Angka Partisipasi Murni SD naik dari 92,88% pada tahun 2006 menjadi 94,97% pada tahun 2007. Begitu pula dengan Angka Partisipasi Kasar SD naik dari 110,84% pada tahun 2001 menjadi 115,95% pada tahun 2006. Angka Partisipasi Murni SLTP naik dari 57,28% pada tahun 2006 menjadi 59,94% pada tahun 2007. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar-nya naik dari 76,57% pada tahun 2006 menjadi 79,24% pada tahun 2007. Angka



Putus Sekolah SD menurun dari 0,35% dari tahun 2006 menjadi 0,29% pada tahun 2007. Begitu pula untuk SLTP menurun dari 2,07% pada tahun 2006 menjadi 1,12% pada tahun 2007.

## **2. Kemampuan SDM**

Efektivitas wajib belajar 9 tahun sangat ditentukan oleh beberapa variabel salah satunya kemampuan SDM aparatur yang menyangkut kemampuan dan keterampilan atau kompetensi dari pengelola pendidikan, baik teknik, manajerial, maupun konseptual dalam mengembang tugas-tugas kerja yang harus dilaksanakannya.

Kemampuan SDM merupakan dalam manajemen SDM merupakan cara untuk meningkatkan produktivitas kerja dengan mengeksplorasi peningkatan keterampilan (*skills*), pengetahuan (*knowledges*), agar pengelola pendidikan tersebut mampu mengerjakan dengan baik suatu pekerjaan yang dibebankan kepadanya, baik untuk masa kini maupun untuk masa datang.

Berdasarkan analisis regresi Variabel ini memberikan kontribusi terbesar pertama terhadap peningkatan efektivitas wajib belajar 9 tahun sebesar 0,443 satuan, berdasarkan analisis deskriptif variabel ini pada aspek tingkat pendidikan program berada pada kategori baik sebanyak 39 orang atau 28,68 persen, aspek ketrampilan pada kategori kurang baik sebanyak 37 orang atau 27,21 persen, aspek pengalaman pada kategori baik

sebanyak 44 orang atau 32,35 persenserta aspek penguasaan teknologi pada kategori kurang baik sebanyak 36 orang atau 26,47 persen.

Sejalan dengan meningkatnya penerapan teknologi maju pada berbagai kegiatan kegiatan, membawa dampak baik yang positif maupun negative bagi aparatur pengelola wajib relajar 9 tahun. Dampak positif dapat dicermati antara lain pada meningkatnya motivasi untuk terus mengembangkan diri dan penyelesaian pekerjaan tepat waktu serta meningkatnya intensitas pembangunan dan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Sedangkan negatif, terutama adalah bagi aparatur yang kurang bisa mengembangkan diri serta lamban dalam bekerja bisa mengakibatkan kerawanan terhadap kualitas hasil pekerjaan.

Beberapa hal yang mendukung terciptanya dukungan terhadap kemampuan aparat antara lain dari identitas responden antara lain sebagian besar pengawas berada pada usia potensial memberikan kinerja yang baik , pengalaman kerja yang cukup serta tingkat pendidikan minimal pengawas adalah yang sudah memadai.

Wujud kemampuan kerja aparatur pengelola wajib relajar 9 tahun yang juga seorang pegawai tersebut dapat dilihat dari terciptanya hubungan keserasian antara bawahan dan atasan, meningkatnya aspek kepribadian dan munculnya sikap keterbukaan manajemen dengan gaya manajerial yang

partisipatif Pegawai yang membawa pengaruh positif terhadap proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Kondisi yang demikian disebabkan oleh karena para pegawai yang telah menguasai bidang tugas dan banyak telah dibekali dengan pengetahuan , sikap dan keterampilan yang memadai

Selain itu, pada dasarnya beberapa program peningkatan kemampuan aparat telah dilakukan bagi para dalam rangka memperbaiki efektivitas kerja dalam mencapai hasil kerja yang maksimal sebagaimana yang telah ditetapkan, lebih dari itu juga diharapkan berdampak pada perbaikan sikap dan perilaku pengawas dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya yang bersih bebas dari praktik-praktik KKN , karena itu juga merupakan kunci yang sangat penting.

Kemampuan aparatur pengelola wajib relajar 9 tahun menjalankan profesinya juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi latar belakang pendidikan, latar belakang pengalaman mengajar, dan indeks prestasi akademik. Sedangkan faktor eksternalnya misalnya dapat berupa sistem pengelolaan, atau kesempatan untuk mengembangkan diri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Ujung Tanah terungkap beberapa kendala menyangkut SDM aparatur pengelola wajib belajar 9 tahun diantaranya

Kapasitas dan kemampuan tenaga pelaksanaan rendah. Para tenaga lapangan yang bertugas memantau pelaksanaan program wajib belajar ke sekolah-sekolah memiliki berbagai keterbatasan diantaranya adalah sarana transportasi dan komunikasi serta ketrampilan teknis. Kemampuan dan motivasi tenaga pelaksana rendah. Keterbatasan-keterbatasan yang ada akhirnya berdampak pada tenaga pelaksana di lapangan untuk melaksanakan tugasnya. Mereka lebih banyak menerima laporan dalam bentuk tertulis daripada mendapatkan langsung dari lapangan data yang sesungguhnya.

### **3. Anggaran Wajib Belajar 9 tahun**

Pendidikan adalah hak setiap warga yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah sebagai representasi Negara. Hal itu mengingat ada tiga tugas Negara yang tidak dapat dielakkan dalam melindungi, memenuhi, dan memajukan warganya. Ketiganya itu bukan sekuensi yang berurutan, melainkan harus dilakukan secara bersama-sama. Sebab yang satu mungkin dihadapkan pada kebutuhan perlindungan, tapi yang lainnya mungkin dihadapkan pada kebutuhan pemenuhan atau bahkan memajukan. Ini artinya bahwa semua warga, baik kaya-miskin, difable maupun tidak difable memiliki hak yang sama yang harus diperhatikan oleh Negara, yang dalam hal ini direpresentasikan oleh Pemerintah termasuk dalam hal penyediaan dan pengelolaan anggaran pendidikan.

Penilaian responden menilai anggaran rutin program wajib belajar 9 tahun pada kategori baik sebanyak 40 orang atau 29,41 persen, anggaran swadaya program wajib belajar 9 tahun pada kategori kurang baik sebanyak 39 orang atau 28,68 persen dan aspek anggaran hasil retribusi program wajib belajar 9 tahun pada kategori baik sebanyak 40 orang atau 29,41 persen serta variabel ini memberikan kontribusi terhadap efektivitas wajib belajar 9 tahun di lokasi penelitian.

Pelaksanaan program Wajib Belajar 9 tahun ini menemui banyak hambatan di lapangan. Hambatan-hambatan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun antara lain: keterbatasan anggaran pendidikan; kemampuan ekonomi masyarakat yang masih rendah, terutama di daerah; dan tidak adanya kerja sama yang sinergis antara berbagai instansi pemerintah dalam rangka menunjang program Wajib Belajar.

Dari sisi yang lain, persentase tamatan Sekolah Dasar yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SLTP cukup besar, dan diperparah lagi oleh tingginya angka putus sekolah pada jenjang pendidikan ini yang cukup tinggi. Permasalahan yang utama dalam mensukseskan pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun adalah bagaimana menjamin bahwa anak-anak yang telah lulus SD bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP, baik SMP biasa, SMP Terbuka atau melalui program Paket B. Sebagian besar dari anak-anak yang mengalami dropout sesungguhnya mempunyai cukup

waktu luang yang dapat dipergunakan untuk mengikuti pendidikan seandainya sarana dan bantuan tersedia untuk mereka.

Pendidikan dasar diperluas sebagai pendidikan yang memenuhi kebutuhan belajar dasar dari semua orang melalui berbagai sistem pengantaran, persekolah formal, pendidikan nonformal/persekolah alternatif untuk mereka yang terbatas atau tiada akses pada persekolahan formal. Berdasarkan hal tersebut diatas Indonesia melaksanakan program Wajib Belajar 9 tahun bagi anak-anak usia 7 – 15 tahun melalui pendidikan dasar SD, atau MI/td dan SLTP atau MTs. Harapan yang digantungkan dalam dunia pendidikan dasar cukup besar untuk mampu mendorong berkurangnya penduduk miskin, akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa masih terdapat banyak sekali anak yang tidak sekolah dan putus sekolah dalam kelompok-kelompok masyarakat pedesaan dan atau masyarakat terpencil, keluarga yang kurang beruntung secara ekonomi/miskin, anak-anak perempuan, dan penyandang cacat. Hal itu disebabkan oleh belum maksimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan terutama pendidikan dasar, karena pada kenyataanya kritik terhadap sekolah karena tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan pendidikan dasar begitu besar pula.

#### **4. Peran serta masyarakat**

Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, kaitannya dengan program wajib belajar 9 tahun menurut pengamatan penulis justru lahir dengan spontan, ini disebabkan masyarakat termotivasi

untuk membangun desanya dalam arti bahwa selama ini masyarakat berkeinginan untuk memiliki atau membangun sendiri berupa jalan, jembatan atau titian, dan berusaha mengembangkan peningkatan perekonomiannya, tetapi daya dan dana yang mereka miliki terbatas.

Dengan adanya stimulasi melalui program wajib belajar 9 tahun maka partisipasi masyarakat yang sudah ada tergerak dalam bentuk menyumbangkan tenaga, sebagian dana, dan lain-lain. Untuk itu partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan tersebut diantaranya dalam hal : ikut melaksanakan apa yang telah diputuskan bersama dan sumbangan berupa uang, material, dan tenaga.

Berdasarkan analisis deskriptif aspek peran serta masyarakat dalam bentuk partisipasi teknis program wajib belajar 9 tahun di lokasi penelitian dinilai oleh responden berada pada kategori baik sebanyak 44 orang atau 32,35 persen, aspek partisipasi praktis menunjukkan berada pada kategori baik sebanyak 41 orang atau 30,15 persen dan aspek partisipasi taktis dalam kegiatan wajib belajar 9 tahun pada kategori kurang baik sebanyak 38 orang atau 27,94 persen.

Dalam rangka menyelenggarakan program wajib belajar sembilan tahun ini, Dinas Pendidikan juga melibatkan partisipasi masyarakat. Pelibatan masyarakat ini mendapatkan dukungan yang cukup besar yang ditunjukkan dengan beberapa indikasi sebagai berikut: a) Bantuan yang diberikan oleh beberapa perusahaan berupa Beasiswa kepada anak-anak

dari keluarga kurang/ tidak mampu; b) Adanya lembaga sekolah swasta yang tidak memungut biaya pendidikan sama sekali. Hal ini karena mereka dibiayai oleh sumbangan atau ditanggung oleh yayasan yang berasal dari donatur; c) Beberapa lembaga sekolah telah mencoba mengembangkan koperasi di lingkungan sekolah yang sebagian hasilnya dimanfaatkan untuk membantu anak-anak dari keluarga miskin; d) Adanya dukungan yang diberikan untuk membangun ruang kelas baru (RKB) bagi SLTP/ MTs dengan pola imbal Swadaya.

Pembiayaan Wajib Belajar sembilan dibiayai oleh APBN, APBD Propinsi dan APBD Kota Makassar. Pembiayaan pendidikan Siswa berasal dari: a) Pungutan biaya yaitu BP3 untuk sekolah negeri dan SPP bagi sekolah swasta; b) Pungutan yang dibebankan kepada siswa relatif rendah dan bagi siswa miskin kebanyakan diberikan keringanan atau bahkan dibebaskan dari iuran sekolah.

Sarana dan Prasarana penunjang wajib belajar sembilan tahun pada saat ini dapat dikatakan relatif memprihatinkan, hal ini tergambar sebagai berikut: banyaknya gedung SD/MI yang sudah tidak layak pakai karena usia, banyaknya gedung SLTP/MTs terutama sekolah swasta yang juga tidak layak pakai; banyaknya lembaga sekolah SLTP/MTs Swasta yang belum memiliki gedung sendiri dan masih menumpang pada gedung lain.

Berdasarkan uraian beberapa variabel faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan wajib belajar 9 tahun diuraikan beberapa



Faktor-faktor yang mendukung proses pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun di Kota Makassar sebagai berikut :

1. Telah tersusunnya program dalam rangka penuntasan wajib belajar sembilan tahun karena program yang telah tersusun akan memberikan dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas. program ini berupa penetapan kurikulum, usia sekolah, pembiayaan, pengajaran dan sebagainya.
2. Adanya koordinasi yang terjadi diantara para penyelenggara. Hal ini akan dapat memberikan kemudahan dan kelancaran pelaksanaan tugas. koordinasi ini dilakukan secara baik oleh masing-masing pihak yang bersangkutan diantaranya adalah: Dinas Pendidikan, DPRD Kabupaten Malang, Para Kepala Sekolah, Dewan Pendidikan serta orang tua siswa yang bersangkutan.
3. Adanya partisipasi masyarakat dalam pendidikan dengan cara mendirikan lembaga-lembaga pendidikan swasta, yang selama ini cukup berpengaruh didalam masalah pendidikan diantaranya adalah lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan seperti Muhammadiyah (Sekolah Muhammadiyah) ;

Sedangkan beberapa faktor Faktor Penghambat program wajib belajar 9 tahun antara lain :

1. Dukungan sarana dan prasarana rendah. Meskipun secara kuantitatif jumlah sarana dan prasana yang dimiliki oleh Pemerintah Kota

Kabupaten Makassar Malang cukup banyak, namun secara kualitatif ternyata kurang layak. Banyak gedung-gedung sekolah yang kondisinya tidak layak sebagai tempat melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar namun tetap dipaksakan sehingga hasilnya menjadi tidak maksimal

2. Dukungan dana operasional rendah. Sebagaimana banyak disampaikan oleh banyak pihak bahwa dana operasional yang mereka peroleh untuk melaksanakan program wajib belajar ini sangatlah rendah. Bahwa untuk biaya operasional saja tidak mencukupi.
3. Sikap moral masyarakat yang belum memperhatikan masalah pendidikan. Masih banyak warga masyarakat yang belum memandang penting manfaat pendidikan Mereka masih berorientasi pada masalah yang mereka rasakan, tanpa memperhatikan kondisi masa kini yang telah berubah banyak. Sehingga cara mereka memperlakukan dunia pendidikanpun sama seperti mereka memperlakukan bidang yang lainnya.
4. Respon orang tua yang belum maksimal. Orang tua sebagai pendorong utama kemajuan pendidikan anak masih belum mampu berperan secara optimal. Orang tua masih memandang bahwa pendidikan formal adalah tugas seorang guru, bukan lagi tanggung jawabnya. Sehingga mereka hanya bersedia dan mampu membimbing peserta didik bidang-bidang diluar sekolah.

5. Lingkungan sosial yang tidak sehat. Lingkungan sosial yang dirasakan juga belum banyak memberikan dorongan. Justru menjadi penghambat, sebab lingkungan lebih banyak membawa peserta didik pada hal-hal yang negatif. Kondisi lingkungan ini perlu mendapatkan perhatian semua pihak, sebab masalah lingkungan bukan hanya tanggung jawab sekolah tetapi juga pemerintah dan orang tua.
6. Diantara faktor penghambat tersebut yang paling dirasakan oleh para penyelenggara pendidikan yakni sekolah-sekolah adalah kendala masalah dana. Meskipun dana bukanlah satu-satunya hal yang menentukan, namun menurut mereka tanpa dana maka mustahil program strategis seperti program wajib belajar sembilan tahun ini dapat dilaksanakan dengan baik tanpa hambatan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka terkait dengan permasalahan-permasalahan di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Gambaran efektivitas program wajib belajar 9 tahun aspek target berada pada kategori baik sebesar 30,15 persen, aspek tujuan program pada kategori kurang baik sebesar 27,94 persen, kemampuan aparat aspek tingkat pendidikan pada kategori baik sebesar 28,68 persen, aspek ketrampilan pada kategori kurang baik sebesar 27,21 persen, aspek pengalaman kategori baik sebanyak sebesar 32,35 persen, aspek penguasaan teknologi kategori kurang baik sebesar 26,47 persen. Variabel anggaran aspek anggaran rutin pada kategori baik sebesar 29,41 persen, aspek anggaran swadaya kategori kurang baik sebesar 28,68 persen, dan aspek anggaran hasil retribusi kategori baik sebesar 29,41 persen. Variable peran serta masyarakat aspek partisipasi teknis pada kategori baik sebesar 32,35 persen, aspek partisipasi praktis sebesar 30,15 persen dan aspek partisipasi taktis kategori kurang baik sebesar 27,94 persen.

2. Terdapat pengaruh variabel kemampuan SDM aparat, anggaran dan peran serta masyarakat yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan efektivitas program wajib belajar 9 tahun kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar

### **B. Saran**

Hasil kesimpulan di atas dalam rangka upaya efektivitas pelaksanaan wajib belajar 9 tahun melalui perbaikan faktor-faktor yang mempengaruhinya dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu dibuat kebijakan-kebijakan dalam bentuk peraturan daerah yang dapat menjamin dilaksanakannya pertanggungjawaban wajib belajar oleh Dinas Pendidikan dalam kondisi apapun. Sehingga setiap program dan kegiatan yang dilakukan terutama dalam melaksanakan program wajib belajar sembilan tahun dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yakni Pemerintah dan Masyarakat luas. Hal ini sangat penting mengingat sumber daya manusia merupakan investasi masa depan yang akan menentukan kelangsungan kehidupan bangsadan negara di era persaingan global.
2. Sebelum membuat kebijakan terkait dengan program wajib belajar sembilan tahun, Dinas Pendidikan sebaiknya melakukan analisa situasi dan kondisi di lapangan, sehingga diharapkan kebijakan yang dikeluarkan

sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Dengan demikian bisa saja kebijakan yang diambil untuk beberapa sekolah sama, namun bisa juga untuk beberapa sekolah berbeda satu sama lain mengingat perbedaan kondisi yang dihadapi oleh masing-masing sekolah tersebut. Penyeragaman kebijakan, hanyalah akan mengulang kegagalan demi kegagalan yang terjadi di masa lalu. Untuk itu demi keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun di kecamatan ujung tanah kota Makassar melakukan analisa situasi dan kondisi riil yang terjadi di lapangan adalah sebuah keharusan bagi Dinas Pendidikan Kota Makassar. Pelaksanaan analisa situasi dan kondisi dapat dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan sendiri ataupun menggunakan pihak luar yang berkompeten dan independensehingga hasil analisisnya diharapkan berkualitas dan objektif.

3. Untuk meningkatkan efektifitas program wajib belajar 9 tahun Dinas Pendidikan harus senantiasa membina melalui pendidikan dan pelatihan orang-orang (pegawai Dinas Pendidikan) yang ditugaskan untuk menyusun laporan akuntabilitas administrasi sehingga laporan yang dibuat benar-benar dapat memenuhi standar laporan akuntabilitas yang sesuai dengan pedoman pemerintah.

## Lampiran 1. Kuisoner Penelitian

### KUESIONER PENELITIAN

Oleh : Hasriwati Syarif

### EFEKTIVITAS KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DI KOTA MAKASSAR

---

#### IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama (boleh tidak ditulis) : .....
2. Tempat dan Tanggal Lahir : .....
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan<sup>\*)</sup>
4. Pendidikan/Jurusan : .....
5. Unit Kerja : .....
6. Jabatan : .....
7. Status Kepegawaian : PNS/Guru Bantu/Guru Honor
8. Masa Kerja : .....
9. Guru Mata Pelajaran : .....
10. Status Perkawinan : Kawin/Tidak Kawin/Duda/Janda
11. Jarak Rumah ke Sekolah : Kurang dari 5 km/5-10 km/lebih
12. Alat transport yang digunakan ke Sekolah: <sup>\*)</sup>
  - a. Jalan kaki/ sepeda/becak;
  - b. Angkutan Kota;
  - c. Sepeda motor (Kendaraan pribadi)

<sup>\*)</sup>Coret yang tidak perlu

#### PETUNJUK PENGISIAN ANGKET

1. *Mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan Anda untuk menjawab seluruh pertanyaan yang disediakan.*
2. *Lingkarilah atau berilah tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang menurut Anda paling sesuai keadaan yang sejujurnya.*
3. *Tidak ada jawaban benar atau salah.*

## **I. EFEKTIVITAS PROGRAM**

1. Dalam melaksanakan aktivitas kerja kedinasan, bagaimana menetapkan target yang akan dicapai?
  - a. Selalu ditetapkan sesuai berdasarkan analisis potensi
  - b. Ditetapkan berdasarkan perkiraan/pengalaman saja
  - c. Ditetapkan tanpa ada berpedoman
  - d. Tidak ada target yang ditetapkan.
2. Menurut pendapat Anda, selama ini hasil realisasi yang dicapai dibandingkan dengan target adalah:
  - a. Realisasi dapat dicapai 80% – 100% dari target
  - b. Realisasi dapat dicapai 61% – 80% dari target
  - c. Realisasi dapat dicapai 41% – 60% dari target
  - d. Realisasi dapat dicapai = 40% dari target.

## **II. KEMAMPUAN SDM**

1. Tingkat pendidikan yang telah Anda selesaikan hingga saat ini adalah:
  - a. Pascasarjana (S2, S3)
  - b. Diploma III, IV, Strata 1 (S1)
  - c. Diploma I, II, PGSD, PGSMMP
  - d. SMA atau sederajat.
2. Jumlah jenis keterampilan yang anda kuasai saat ini adalah:
  - a. 3 (tiga) atau lebih jenis keterampilan
  - b. 2 (dua) jenis keterampilan
  - c. 1 (satu) jenis keterampilan
  - d. Tidak ada keterampilan yang dikuasai.
3. Pengalaman kerja Anda pada pekerjaan sekarang ini adalah:
  - a. Sudah 10 tahun atau lebih
  - b. Antara 5 – 10 tahun
  - c. Sekitar 2 – 5 tahun
  - d. Kurang dari 2 tahun.



4. Apakah Anda dapat menjalankan dan menguasai teknologi media pengajaran, seperti komputer, internet, dan multimedia:
  - a. Saya menguasai teknologi media pengajaran, seperti komputer, internet, dan multimedia.
  - b. Saya hanya tahu menjalankan teknologi media pengajaran, seperti komputer, internet, dan multimedia
  - c. Saya hanya tahu menggunakan komputer
  - d. Saya tidak tahu.

### **III. ANGGARAN**

1. Menurut pendapat Anda, kemampuan pendanaan/pembiayaan untuk menunjang efektivitas Wajib Belajar 9 Tahun pada Kepulauan dan Daratan di Kecamatan Ujung Tanah untuk pendanaan/pembiayaan yang diperoleh dari anggaran rutin adalah:
  - a. Sangat besar
  - b. Besar
  - c. Sedang
  - d. Kecil
2. Menurut pendapat Anda, kemampuan pendanaan/pembiayaan untuk menunjang efektivitas Wajib Belajar 9 Tahun pada Kepulauan dan Daratan di Kecamatan Ujung Tanah untuk pendanaan/pembiayaan yang diperoleh dari swadaya adalah:
  - a. Sangat besar
  - b. Besar
  - c. Sedang
  - d. Kecil
3. Menurut pendapat Anda, kemampuan pendanaan/pembiayaan untuk menunjang efektivitas Wajib Belajar 9 Tahun pada Kepulauan dan Daratan di Kecamatan Ujung Tanah untuk pendanaan/pembiayaan yang diperoleh dari hasil retribusi adalah:

- a. Sangat besar
- b. Besar
- c. Sedang
- d. Kecil

#### **IV. PERANSERTA MASYARAKAT**

1. Menurut pendapat Anda, peranserta masyarakat dalam memberikan bantuan teknis (bantuan dana) untuk menyelesaikan Program Wajib Belajar 9 Tahun pada Kepulauan dan Daratan di Kecamatan Ujung Tanah adalah:
  - a. Selalu aktif memberikan bantuan dana
  - b. Sering memberikan bantuan dana
  - c. Kadang-kadang memberikan bantuan dana
  - d. Tidak pernah memberikan bantuan dana.
2. Menurut pendapat Anda, peranserta masyarakat dalam memberikan bantuan praktis (bantuan tenaga) untuk menyelesaikan Program Wajib Belajar 9 Tahun pada Kepulauan dan Daratan di Kecamatan Ujung Tanah adalah:
  - a. Selalu aktif memberikan bantuan tenaga
  - b. Sering memberikan bantuan tenaga
  - c. Kadang-kadang memberikan bantuan tenaga
  - d. Tidak pernah memberikan bantuan tenaga.
3. Menurut pendapat Anda, peranserta masyarakat dalam memberikan bantuan taktis (bantuan pikiran) untuk menyelesaikan Program Wajib Belajar 9 Tahun pada Kepulauan dan Daratan di Kecamatan Ujung Tanah adalah:
  - a. Selalu aktif memberikan bantuan pikiran
  - b. Sering memberikan bantuan pikiran
  - c. Kadang-kadang memberikan bantuan pikiran
  - d. Tidak pernah memberikan bantuan pikiran.

**Lampiran 2. Rekapitulasi Data Hasil Efektifitas Kebijakan Program**

NO	Efektifitas Kebijakan Program		Total
	P1	P2	
1	2	1	3
2	2	3	5
3	1	2	3
4	3	4	7
5	4	3	7
6	4	4	8
7	2	2	4
8	4	2	6
9	1	4	5
10	1	4	5
11	4	1	5
12	4	4	8
13	4	4	8
14	4	4	8
15	4	4	8
16	4	4	8
17	4	4	8
18	4	4	8
19	4	4	8
20	4	4	8
21	4	4	8
22	4	4	8
23	4	3	7
24	4	4	8
25	4	3	7
26	2	2	4
27	3	2	5
28	3	3	6
29	3	3	6
30	3	3	6
31	3	3	6
32	2	1	3
33	3	1	4

34	3	3	6
35	3	3	6
36	3	3	6
37	3	2	5
38	1	1	2
39	3	1	4
40	2	2	4
41	3	1	4
42	3	3	6
43	2	3	5
44	1	1	2
45	2	2	4
46	3	2	5
47	3	3	6
48	3	1	4
49	3	3	6
50	2	1	3
51	1	2	3
52	2	3	5
53	1	1	2
54	3	3	6
55	3	3	6
56	1	2	3
57	2	1	3
58	2	3	5
59	2	2	4
60	2	2	4
61	3	2	5
62	1	2	3
63	2	2	4
64	2	3	5
65	1	1	2
66	3	2	5
67	4	4	8
68	3	3	6
69	1	3	4
70	1	1	2
71	2	3	5
72	3	3	6

73	2	2	4
74	4	4	8
75	1	3	4
76	2	2	4
77	3	2	5
78	2	3	5
79	2	2	4
80	3	2	5
81	3	1	4
82	1	1	2
83	3	2	5
84	1	2	3
85	4	4	8
86	3	1	4
87	4	1	5
88	4	2	6
89	2	2	4
90	1	3	4
91	4	3	7
92	3	1	4
93	1	3	4
94	4	2	6
95	1	3	4
96	1	4	5
97	3	2	5
98	3	2	5
99	3	3	6
100	3	2	5
101	1	1	2
102	4	4	8
103	4	4	8
104	1	1	2
105	2	3	5
106	2	4	6
107	2	3	5
108	4	1	5
109	4	4	8
110	1	4	5
111	4	3	7

112	1	4	5
113	4	2	6
114	4	2	6
115	4	2	6
116	4	4	8
117	3	4	7
118	4	2	6
119	3	1	4
120	2	4	6
121	4	2	6
122	1	2	3
123	1	4	5
124	2	4	6
125	4	1	5
126	2	4	6
127	3	3	6
128	4	4	8
129	3	2	5
130	4	3	7
131	3	4	7
132	3	3	6
133	1	1	2
134	4	2	6
135	3	1	4
136	1	1	2

### Lampiran 3. Rekapitulasi Data Hasil Kuesioner Kemampuan SDM

NO	Kemampuan SDM				Total
	P1	P2	P3	P4	
1	4	4	4	4	16
2	1	1	1	1	4
3	1	1	1	1	4
4	1	1	1	1	4
5	4	3	3	3	13
6	1	4	3	4	12
7	3	2	1	1	7
8	1	2	3	2	8
9	4	3	2	3	12
10	3	3	3	2	11
11	4	1	1	3	9
12	4	2	4	4	14
13	4	1	3	3	11
14	2	2	2	4	10
15	4	2	3	3	12
16	1	3	1	4	9
17	4	2	1	4	11
18	4	3	1	3	11
19	1	2	3	1	7
20	2	4	3	4	13
21	3	2	4	3	12
22	2	3	2	1	8
23	4	4	4	1	13
24	4	2	4	2	12
25	3	2	3	3	11
26	1	4	1	2	8
27	2	3	3	3	11
28	2	4	2	2	10
29	4	4	1	3	12
30	2	4	2	2	10
31	4	2	2	2	10
32	3	4	4	3	14
33	4	3	2	3	12

34	2	4	4	2	12
35	2	2	2	2	8
36	2	4	2	4	12
37	2	1	1	4	8
38	3	1	2	2	8
39	2	4	3	3	12
40	4	1	3	2	10
41	2	4	2	2	10
42	2	1	4	1	8
43	2	3	2	2	9
44	1	4	1	1	7
45	1	2	2	2	7
46	2	1	1	3	7
47	1	3	2	1	7
48	2	2	4	3	11
49	2	4	4	2	12
50	1	2	2	3	8
51	4	2	3	4	13
52	3	1	3	4	11
53	3	3	4	3	13
54	1	1	3	4	9
55	2	4	4	1	11
56	2	2	1	1	6
57	3	4	2	3	12
58	4	1	1	2	8
59	4	1	3	2	10
60	2	2	4	2	10
61	1	1	3	3	8
62	1	1	4	3	9
63	3	2	3	4	12
64	1	3	2	2	8
65	2	2	4	4	12
66	1	2	3	1	7
67	3	2	1	2	8
68	2	2	3	1	8
69	2	4	2	4	12
70	1	2	4	2	9
71	3	4	3	4	14
72	3	4	2	2	11



73	3	2	3	3	11
74	3	3	2	1	9
75	3	1	2	1	7
76	3	4	4	3	14
77	3	1	3	1	8
78	1	2	2	2	7
79	1	4	3	2	10
80	3	3	3	1	10
81	2	4	4	2	12
82	4	4	3	2	13
83	2	3	2	1	8
84	4	2	3	3	12
85	4	2	1	1	8
86	4	3	2	1	10
87	3	2	1	4	10
88	4	2	4	1	11
89	3	4	1	3	11
90	3	4	1	3	11
91	1	1	2	3	7
92	4	3	1	4	12
93	2	3	3	4	12
94	4	1	1	2	8
95	2	4	3	2	11
96	4	4	1	1	10
97	1	1	2	2	6
98	4	1	2	4	11
99	1	3	2	4	10
100	4	3	4	4	15
101	3	1	2	4	10
102	3	4	1	4	12
103	4	1	2	1	8
104	4	2	1	1	8
105	3	3	3	4	13
106	3	4	4	2	13
107	4	4	1	4	13
108	3	3	3	1	10
109	3	3	4	4	14
110	3	4	4	4	15
111	3	2	2	2	9

112	1	1	4	3	9
113	3	2	4	3	12
114	3	3	2	3	11
115	3	3	4	4	14
116	3	2	3	2	10
117	4	1	3	1	9
118	4	3	3	1	11
119	1	3	3	3	10
120	4	1	1	1	7
121	1	4	4	3	12
122	3	4	4	4	15
123	3	1	4	1	9
124	1	1	4	2	8
125	4	4	3	4	15
126	2	1	3	1	7
127	2	3	4	3	12
128	3	1	3	2	9
129	3	3	1	4	11
130	1	3	3	3	10
131	1	4	3	4	12
132	3	3	3	1	10
133	2	3	3	1	9
134	1	2	1	2	6
135	2	2	3	2	9
136	2	2	3	3	10

**Lampiran 4. Rekapitulasi Data Hasil Kuesioner Anggaran**

NO	Anggaran			Total
	P1	P2	P3	
1	1	2	1	4
2	4	1	2	7
3	4	4	3	11
4	4	4	4	12
5	3	3	2	8
6	3	1	3	7
7	4	4	4	12
8	3	4	4	11
9	3	4	4	11
10	2	3	4	9
11	1	4	4	9
12	1	4	1	6
13	2	4	1	7
14	1	4	4	9
15	5	5	5	15
16	5	5	5	15
17	5	5	5	15
18	4	3	1	8
19	4	1	3	8
20	1	1	2	4
21	3	2	4	9
22	1	1	4	6
23	2	2	4	8
24	3	1	3	7
25	1	4	2	7
26	3	2	3	8
27	2	3	3	8
28	1	2	1	4
29	3	1	1	5
30	1	3	2	6
31	2	1	1	4
32	1	2	1	4
33	2	3	1	6

34	3	1	1	5
35	3	3	3	9
36	3	4	1	8
37	2	4	3	9
38	2	1	4	7
39	3	1	1	5
40	2	3	1	6
41	2	2	1	5
42	1	2	3	6
43	2	4	4	10
44	3	1	4	8
45	2	2	4	8
46	4	4	4	12
47	2	2	1	5
48	4	4	3	11
49	1	2	2	5
50	1	3	2	6
51	2	2	2	6
52	3	3	4	10
53	3	2	4	9
54	2	2	4	8
55	1	3	1	5
56	1	2	2	5
57	1	4	3	8
58	2	1	1	4
59	2	3	1	6
60	4	3	2	9
61	4	3	4	11
62	2	3	3	8
63	1	4	3	8
64	1	2	1	4
65	3	3	3	9
66	3	2	3	8
67	1	4	2	7
68	4	2	3	9
69	4	4	4	12
70	3	1	4	8
71	1	3	1	5
72	4	1	4	9

73	4	3	3	10
74	2	2	1	5
75	3	1	3	7
76	2	2	2	6
77	4	3	4	11
78	3	3	4	10
79	2	4	3	9
80	4	1	1	6
81	1	2	4	7
82	3	1	1	5
83	1	3	3	7
84	3	3	2	8
85	3	2	1	6
86	4	4	3	11
87	2	4	3	9
88	4	2	4	10
89	4	4	4	12
90	3	2	2	7
91	3	2	1	6
92	3	4	1	8
93	4	2	3	9
94	3	4	4	11
95	2	1	1	4
96	4	1	3	8
97	2	2	2	6
98	3	4	3	10
99	2	3	3	8
100	1	2	2	5
101	3	4	2	9
102	1	1	2	4
103	1	2	1	4
104	3	4	4	11
105	3	3	4	10
106	3	2	1	6
107	1	2	4	7
108	2	3	3	8
109	1	2	1	4
110	2	2	3	7
111	3	3	1	7

112	2	1	1	4
113	4	2	3	9
114	2	2	3	7
115	2	2	3	7
116	1	4	1	6
117	1	4	2	7
118	1	2	2	5
119	3	2	1	6
120	3	2	2	7
121	4	4	3	11
122	2	3	3	8
123	3	4	3	10
124	4	3	3	10
125	2	4	3	9
126	1	4	3	8
127	1	1	3	5
128	2	1	2	5
129	2	1	1	4
130	4	1	3	8
131	3	3	1	7
132	3	1	2	6
133	3	3	3	9
134	3	3	2	8
135	4	4	1	9
136	1	1	1	3

### Lampiran 5. Rekapitulasi Data Hasil Kuesioner Peran Serta Masyarakat

NO	Peran Serta Masyarakat			Total
	P1	P2	P3	
1	1	1	1	3
2	2	2	2	6
3	3	2	2	7
4	3	2	3	8
5	2	2	2	6
6	2	1	1	4
7	1	2	3	6
8	1	1	2	4
9	2	3	3	8
10	4	3	2	9
11	3	3	3	9
12	3	4	3	10
13	3	3	3	9
14	3	2	3	8
15	2	3	4	9
16	3	3	3	9
17	3	4	4	11
18	4	4	3	11
19	3	4	4	11
20	4	4	4	12
21	4	3	4	11
22	4	4	4	12
23	1	4	2	7
24	4	4	3	11
25	2	3	2	7
26	1	4	4	9
27	3	2	4	9
28	3	3	3	9
29	2	1	3	6
30	4	3	3	10
31	2	2	2	6
32	1	1	2	4
33	2	2	2	6

34	2	3	3	8
35	2	3	3	8
36	1	1	1	3
37	1	1	2	4
38	4	4	2	10
39	3	3	1	7
40	4	1	3	8
41	3	3	2	8
42	2	1	4	7
43	4	2	3	9
44	3	3	4	10
45	1	1	1	3
46	1	1	4	6
47	3	3	2	8
48	3	4	1	8
49	1	3	4	8
50	4	3	3	10
51	4	3	1	8
52	2	2	1	5
53	3	4	2	9
54	4	4	2	10
55	4	3	1	8
56	4	1	1	6
57	4	4	1	9
58	3	4	3	10
59	4	2	4	10
60	2	3	2	7
61	1	2	4	7
62	1	4	2	7
63	3	2	1	6
64	1	1	1	3
65	4	3	1	8
66	2	4	4	10
67	2	3	1	6
68	4	1	2	7
69	1	4	1	6
70	3	2	3	8
71	4	4	1	9
72	1	2	1	4



73	1	4	4	9
74	4	2	1	7
75	4	4	1	9
76	2	3	4	9
77	4	1	3	8
78	1	4	2	7
79	3	3	1	7
80	1	3	1	5
81	4	2	2	8
82	1	2	2	5
83	3	3	2	8
84	4	4	4	12
85	3	4	2	9
86	1	1	2	4
87	3	2	3	8
88	4	4	4	12
89	3	3	3	9
90	3	1	1	5
91	2	3	4	9
92	3	1	1	5
93	1	2	2	5
94	4	2	4	10
95	1	2	1	4
96	2	1	1	4
97	1	1	2	4
98	1	1	2	4
99	1	1	4	6
100	4	1	1	6
101	3	1	3	7
102	2	2	2	6
103	2	1	4	7
104	3	4	4	11
105	4	3	2	9
106	3	2	1	6
107	2	4	1	7
108	3	2	4	9
109	1	1	1	3
110	3	2	2	7
111	2	4	3	9

112	1	1	3	5
113	2	1	1	4
114	3	1	1	5
115	3	2	4	9
116	2	3	3	8
117	4	1	1	6
118	3	3	2	8
119	1	4	1	6
120	2	3	2	7
121	4	4	1	9
122	4	3	2	9
123	4	3	2	9
124	3	1	2	6
125	2	4	4	10
126	3	4	4	11
127	3	2	3	8
128	3	1	4	8
129	3	1	4	8
130	3	2	2	7
131	2	4	2	8
132	1	2	3	6
133	3	4	1	8
134	2	2	1	5
135	1	2	3	6
136	4	4	3	11

## Lampiran 6. Hasil Perhitungan Analisis Regresi

### Regression

**Variables Entered/Removed<sup>b</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Peran Serta Masyarakat, Kemampuan SDM, <sup>a</sup> Anggaran	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Efektivitas wajib belajar

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.931 <sup>a</sup>	.867	.864	.636

a. Predictors: (Constant), Peran Serta Masyarakat, Kemampuan SDM, Anggaran

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	347.145	3	115.715	286.438	.000 <sup>a</sup>
	Residual	53.325	132	.404		
	Total	400.471	135			

a. Predictors: (Constant), Peran Serta Masyarakat, Kemampuan SDM, Anggaran

b. Dependent Variable: Efektivitas wajib belajar

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.447	.320		4.519	.000
	Kemampuan SDM	.443	.047	.420	9.450	.000
	Anggaran	.307	.024	.576	12.622	.000
	Peran Serta Masyarakat	.145	.023	.064	6.301	.006

a. Dependent Variable: Efektivitas wajib belajar